

Rakyat Merdeka

R.M.id
Rakyat Merdeka

UTANG TERJAGA, EKONOMI TERKENDALI

REDAKSI: 021-53699507 (EXT 727) FAKS: 021-53671716 LAYANAN IKLAN: FAX: 021-5333156 SERVIS PELANGGAN: 021-53674444

Rp 9.000 (LUAR P JAWA Rp 11.000)

Bicara Defisit Anggaran 2026 Purbaya Jamin Utang Terkontrol

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan tetap terkendali di bawah 3 persen. Dengan defisit yang terjaga, utang pemerintah dipastikan tetap terkontrol.

PURBAYA menegaskan, pemerintah memiliki instrumen yang memadai untuk menjaga defisit tetap terkendali, termasuk melalui pengelolaan utang secara hati-hati, serta mendorong pertumbuhan ekonomi guna mengoptimalkan pendapatan negara.

“Masalah defisit bukan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Kita akan mengontrol itu. Saya tidak akan lewat dari batas itu. Jadi Anda tidak usah takut saya berutang tidak terkendali,” tegasnya dalam acara Economic Outlook di Graha CIMB

Niaga, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Pemerintah menetapkan target defisit APBN 2026 sebesar Rp 689,1 triliun atau setara 2,68 persen dari PDB. Target pendapatan negara dipatok Rp 3.153,5 triliun untuk menopang belanja negara sebesar Rp 3.842,7 triliun.

Pendapatan tersebut bersumber dari penerimaan pajak sebesar Rp 2.357,7 triliun, kepastian dan cukai Rp 335 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 459,2

BERSAMBUNG KE HAL 6

Presiden Pimpin Ratas Di Istana Kampung Nelayan & Masalah Sampah Dibahas Serius

PEMBANGUNAN Kampung Nelayan dan penuntasan masalah sampah menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Kamis (12/2/2026), Prabowo memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, membahas hal ini.

Hadir antara lain Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

(Mendiknas) Brian Yulianto Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria. Para pejabat yang diundang hadir secara bergantian sejak pukul 14.00 WIB.

Sebelum memasuki ruang rapat, Brian mengaku belum mengetahui secara pasti agenda yang akan dibahas. Namun, ia menduga rapat tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan penanganan sampah mikro sehari sebelumnya.

“Saya belum tahu, nanti mungkin melanjutkan yang sampah mikro kemarin,” kata Brian kepada wartawan.

BERSAMBUNG KE HAL 6

Hadapi Pemilu 2029 Bahliil Pilih Nyaleg Dari Dapil Papua

KETUA umum parpol biasanya ngebet ingin menjadi capres atau cawapres. Namun, tidak demikian dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahliil Lahadalia. Di Pemilu 2029, Bahliil memilih menjadi caleg. Sedangkan untuk capres, menyerah-

kan dukungan penuh ke Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Ia mengungkapkan, Bahliil telah men-

BERSAMBUNG KE HAL 6

Siap Digunakan Tarawih & Salat Id Masjid IKN Berstandar Internasional

MASJID Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sudah berdiri megah. Bangunannya keren dan berstandar internasional. Masjid IKN pun sudah siap digunakan untuk Salat Tarawih dan Salat Idul Fitri 1447 H.

Masjid IKN berdiri di atas lahan

32.125 meter, dengan luas dibangun 61.596 meter persegi. Bangunannya dibagi dalam empat lantai dan dua mezzanine. Masjid ini mampu menampung 29.095 jemaah, dan mencapai 60 ribu setelah proyeksi perluasan.

Pembangunannya menggabungkan unsur modern dan spiritual. Desain masjid mengadopsi konsep sorban tergulung yang berputar searah jarum tawaf saat ibadah haji. Di sampingnya, berdiri menara indah setinggi 99 meter, yang merepresentasikan Asmaul Husna.

Di dalam masjid dilengkapi per-

BERSAMBUNG KE HAL 6



PIMPIN RATAS: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Rapat tersebut salah satunya membahas percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sekaligus penguatan ekosistem industri perikanan nasional melalui konsolidasi galangan kapal dan pengembangan hilirisasi.

Vox Populi

CATATAN

Budi Rahman Hakim, Ph.D.

Keadilan Tak Netral

TIDAK berpihak sering kali berarti berpihak pada yang kuat. Dalam konflik sosial—dari sengketa lahan hingga perselisihan perburuhan—negara kerap berdiri di tengah dan menyebutnya netral. Di atas kertas, posisi itu tampak adil. Di lapangan, ia sering menjadi ilusi yang melanggengkan ketimpangan.

Netralitas prosedural memang penting. Hukum harus berlaku sama, aturan harus konsisten. Namun ketika dua pihak datang dengan daya tawar yang timpang—yang satu bermodal kuasa dan akses, yang lain hanya membawa kebutuhan hidup—netralitas tanpa keberpihakan substantif menjadi bias yang terselubung. Keadilan bukan sekadar sama rata, melainkan tepat sasaran.

Dalam banyak kasus, negara memilih aman: memediasi tanpa menyentuh akar masalah, menunda keputusan demi stabilitas. Hasilnya adalah kompromi yang terlihat damai, tetapi menyisakan ketidakadilan. Yang lemah diminta menerima, yang kuat diminta sabar. Keduanya terdengar seimbang, padahal dampaknya tidak setara.

Ketika konflik memanas, aparat hadir menjaga ketertiban. Ketertiban perlu, tetapi ia bukan tujuan akhir. Jika yang dijaga hanya tenangnya permukaan, sementara ketimpangan dibiarkan, maka keadilan menjadi kosmetik. Negara

BERSAMBUNG KE HAL 6

Israel Masuk Badan Perdamaian Bentuk Trump Sikap Indonesia Bela Palestina Tidak Berubah

ISRAEL resmi masuk Dewan Perdamaian (Board of Peace) Palestina bentuk Presiden AS Donald Trump. Namun, langkah yang memicu tanda tanya global itu tetap tak mengubah sikap politik Indonesia terhadap Israel.

Indonesia tetap bela kemerdekaan Palestina. Keanggotaan Israel di *Board of Peace* (BoP) diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu usai bertemu Presiden

Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington DC, Rabu (11/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Netanyahu dan Rubio terlihat

BERSAMBUNG KE HAL 6



EVAKUASI KORBAN: Personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 yang dibantu unsur TNI mengevakuasi dua awak pesawat perintis yang menjadi korban dalam insiden penembakan di Korowai, Papua Selatan, Kamis (12/2/2026). Kedua jenazah diterbangkan ke Timika untuk proses identifikasi dan autopsi. Setelah pemulasaraan selesai, jenazah akan diberangkatkan ke Jakarta untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Sosiologi Korupsi (34)

Kasus Pengecualian Dalam Kisah Nabi Ibrahim AS

AL-QUR'AN menampilkan contoh lain mengenai kasus pengecualian ini melalui kisah Nabi Ibrahim AS. Beliau diperintahkan untuk menyembelih putra tunggalnya saat itu, Nabi Ismail AS, dengan pisau tajam.

Pistiwa ini diabadikan dalam Al-Qur'an: “Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: ‘Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirlah apa pendapatmu!’ Ia menjawab: ‘Hai bapakku, kerjakanlah apa yang di-

perintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.’”

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, (nyatalah kesabaran keduanya).” (QS al-Shaffat/37:102-103).

Perintah penyembelihan tersebut diyakini berasal dari Tuhan yang dihormati dalam hidupnya, yakni putra yang telah lama ia dambakan. Beruntung, penyembelihan itu tidak sampai merenggut nyawa Nabi Ismail karena digantikan oleh seekor qibasy

nya. Jika dilihat dari kacamata hukum positif, perbuatan Nabi Ibrahim tersebut bisa masuk ke dalam kategori tindak pidana.

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit tujuan dari perintah penyembelihan tersebut. Kita hanya dapat memahami bahwa Nabi Ibrahim sedang diuji oleh Tuhan untuk menyembelih sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, yakni putra yang telah lama ia dambakan. Beruntung, penyembelihan itu tidak sampai merenggut nyawa Nabi Ismail karena digantikan oleh seekor qibasy

TAULITIK Tausiah Politik

Oleh: Prof Nasaruddin Umar
(Menteri Agama/Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta)



(domba/kambing).

Hingga kini, ritual penyembelihan hewan kurban menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Idul Adha setiap tahun, dengan hukum wajib bagi mereka yang mampu. Seandainya

tidak digantikan dengan qibasy dan manusia tetap harus dikurbankan, hal ini tentu akan memicu masalah kemanusiaan yang besar di masa

BERSAMBUNG KE HAL 6



Pejabat Jarang Diajak Rapat

Meski belum mendapat pemberitahuan bakal dipecat, seorang pejabat merasa posisinya sudah tidak aman. Salah satu tandanya, dia jarang diajak rapat oleh bosnya. Dia juga jarang diikutsertakan dalam kunjungan kerja ke daerah. ■

Pengangkatan Adies Kadir Sebagai Hakim MK Digugat Ke MKMK, Salah Alamat Nih...

Sejumlah akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALs) melaporkan dugaan pelanggaran kode etik terkait proses pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jumat (6/2/2026) sore, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka berdalih, pengaduan ini

diajukan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga keluhuran martabat dan integritas Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, kalangan Dewan di Komisi III DPR menilai desakan agar MKMK membatalkan pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi, adalah permintaan yang tidak tepat dan salah kamar. "Permintaan tersebut tidak

didasarkan oleh basis argumentasi hukum yang tepat dan relevan dengan konteks tersebut," ujar Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo. Menurut dia, MKMK tidak memiliki kewenangan untuk menganulir pengangkatan hakim konstitusi yang telah ditetapkan melalui keputusan presiden (Keppres). Dia menegaskan, MKMK hanya

berwenang mengadili dugaan pelanggaran etik hakim yang bersifat post factum, bukan menilai atau membatalkan proses pengangkatan. "Sebab, MKMK mengadili etik hakim yang bersifat post factum, bukan apriori pengangkatan, apalagi menganulir Kepres terkait pengangkatan hakim MK berlaku asas presumption of legality," kata Rudianto.

Politikus Nasdem itu menjelaskan, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara tegas mengatur mekanisme pengisian hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk melihat perdebatan soal ini lebih jauh, berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra dan Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Berikut pernyataannya:

SOEDESON TANDRA, Anggota Komisi III DPR Adies Kadir Sudah Menjalani Semua Proses



“Masing-masing lembaga tidak saling mengintervensi. Proses di Komisi III, termasuk *fit and proper test*, sudah dilakukan. Adies Kadir juga sudah dilantik melalui SK Presiden dan telah menjalankan tugasnya.

Sebagai anggota Komisi III DPR, apa pandangan Anda terkait gugatan keterpilihan Adies Kadir sebagai hakim MK ke MKMK? Kita menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat atau gugatan. Namun, kita adalah negara hukum, di mana institusi-institusi negara sudah diatur secara rapi berdasarkan prinsip trias politika. Masing-masing lembaga tidak saling mengintervensi. Proses di Komisi III, termasuk *fit and proper test*, sudah dilakukan. Adies Kadir juga sudah dilantik melalui SK Presiden dan telah menjalankan tugasnya.

Apakah menurut Anda laporan ke MKMK sudah sesuai? MKMK berwenang memeriksa pelanggaran kode etik dan keluhuran martabat hakim, yang sifatnya *post-factum* artinya setelah hakim dilantik dan menjalankan tugasnya. Jika ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas, barulah itu bisa diperiksa berdasarkan kode etik masing-masing institusi. Jika laporan tersebut dinilai tidak sesuai dengan tupoksi MKMK, apakah sebaiknya diabaikan? Tidak bisa diabaikan. Dalam prinsip hukum, hakim tidak boleh me-

olak perkara. Setiap laporan yang masuk wajib diperiksa. Jika memang tidak sesuai atau melampaui kewenangan (*ekstralegem*), tentu akan ditolak melalui mekanisme yang berlaku. Apakah Anda yakin laporan tersebut akan ditolak oleh MKMK? Kita tidak boleh mendahului putusan, karena itu merupakan kewenangan dan ranah MKMK. Kita juga tidak boleh mengintervensi. Namun, saya percaya para anggota MKMK adalah negarawan yang akan menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. ■ REN

TRUBUS RAHADIANSYAH, Guru Besar Universitas Trisakti Yang Kita Persoalkan Prosesnya Di DPR



“Publik menilai ada kejanggalan karena prosesnya sangat cepat, hanya dua hari. Padahal, pemilihan hakim MK seharusnya dilakukan secara transparan, terbuka, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik.

Apa pendapat Anda terkait gugatan atas keterpilihan Adies Kadir sebagai hakim MK ke MKMK? Apa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tersebut merupakan bagian dari praktik demokrasi. Kita lihat nanti bagaimana MKMK memberikan jawaban atas gugatan itu. Beberapa profesor turut permasalahan proses tersebut. Bagaimana Anda melihatnya? Yang dipersoalkan adalah proses terpilihnya qAdies Kadir sebagai hakim MK menggantikan Ignasius Samsul. Publik menilai ada kejanggalan karena prosesnya sangat cepat,

hanya dua hari. Padahal, pemilihan hakim MK seharusnya dilakukan secara transparan, terbuka, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Ini menjadi perhatian karena ke depan proses pemilihan hakim MK perlu dilakukan lebih komprehensif dan terbuka. Yang dipersoalkan adalah proses di DPR. Apakah itu sudah sesuai aturan? Secara logika hukum, MKMK berwenang pada ranah kode etik hakim. Sementara yang dipersoalkan publik justru proses di DPR. Biasanya proses pemilihan membutuhkan waktu mini-

mal enam bulan, tetapi kali ini hanya dua hari. Itu yang menjadi tanda tanya publik. Apa yang sebenarnya diharapkan publik? Publik menuntut agar DPR menjelaskan proses tersebut secara terbuka. Dalam sistem demokrasi yang semakin terbuka, apalagi dengan perkembangan media sosial, transparansi menjadi sangat penting. DPR kerap melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) untuk berbagai jabatan publik, sehingga proses tersebut seharusnya melibatkan publik secara luas agar tidak menimbulkan kecurigaan. ■ REN

Rakyat Merdeka

THE POLITICAL NEWS LEADER

Terbit Sejak 22 April 1999

Direktur Utama:
Kiki Iswara Darmayana

Direktur:
Triphonia Istiari, Maria Hanief, Ratna Susilowati

Dewan Kebijakan Redaksi:
Karim Paputungan, Supratman

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab:
Riky Handayani

Wakil Pemimpin Redaksi:
Kartika Sari

Kepala Redaktur Eksekutif:
Muhammad Rusmadi, Wahyu Suryani, Sarif Hidayat

Pemimpin RM Digital:
Firsty Hestiyani

Redaktur Eksekutif:
Abdul Shomad, Aditya Nugroho, Anggowo Adi Septaningrat, Aulia Darwis, Daud Fadhilah, Esti Fitri Wulandari, Fiki Azis, Riffmi M, Ujang Sunda

Asisten Redaktur Eksekutif:
Bambang Trismawan, Dede Hermawan, Fazry, Marula Sardi, Oktavian Surya Dewangga, Romdony Setiawan, Siswanto, Widia Saputra

Reporter:

Ade Al Kautsar, Ahmad Latif Rosyidi, Alfian Sidik, Bayu Prihartanto, Boy Sakti Hapsoro, Danu Arifinoto, Diananda Rahmasari, Didi Rustandi, Dwi Ithami, Edy Burnama, Fajar El Pradianto, Faqih Mubarak, Haikal Amirullah, Hendrawan Kosim Wijaya, Irandi Kasmara, Irma Yulia, Kintan Pandujati, Khoirul Umam, Merry Apriyani, Mentari Kusumawardhani, Nana Maulana, Nur Rochmanuddin, Novalliandy, Ospi Darma, Paul Yoanda, Susilo Yekti

Wartawan Foto:

Sophan Wahyudi (Koordinator), Ali Futuhin (Wakil), Dwi Pambudo, Indra Hardi, Khairizal Anwar, M Qori Haliana, Ng Putu Wahyu Rama, Randy Tri Kurniawan, Rizky Syahputra, Tedy Octariawan Kroen, Wahyu Dwi Nugroho

Pracetak:
Fauzan Sojana (Koordinator)

Telp: 021-53699507, Hotline Pemasaran: 021-53699507, Jalur WhatsApp: Redaksi 081298336822 (Sri Nurganingsih), Iklan 08131555825 (Muanis), 08161121764 (Luyu), Layanan Pelanggan 08129966675 (Toni)

Harga Iklan: 99.000/mmk (FC), 85.000/mmk (BW). Harga Langganan Koran: Rp200.000/bulan (Belum termasuk ongkos kirim)

Rekening Bank BCA KCP Pal Merah 229.300.8515 an PT Wahana Ekonomi Semesta

Manager Keuangan: Haris Indrawan, Manager Akunting: Dame Asnauli Gabena, Manager SDM: Mashuri, Legal Group: Wendi Darain

Tim Iklan:
Heru Dwiatmoko (Manager), Muanis (Wakil), Sofwan Tamami, Sandi Suwardi, Indra Firma, Muhtar Fauzi

Pemasaran:
Sultoni (Manager), Kusdiyono (Wakil)

SK Menpen RI No 326/SK/Menpen/SIUPP/1998.
Dengan perubahan pada 6 April 1999 Surat Menpen/Dirjen PPG No 88/Dirjen PPG/1999

Rakyat Merdeka - Sertifikat Dewan Pers, 9 Februari 2017

RM id - Sertifikat Dewan Pers, 31 Desember 2021

Alamat: Gedung Graha Pena, Lantai 8, Jl Kebayoran Lama No 12, Jakarta Selatan 12210
Percetakan: PT. Wahana Semesta Intermedia, Jl Jampang No. 99A Bekasi. Telp 0811071633

Hibah Kapal Patroli Jepang Komisi I: Sesuai Kebutuhan TNI AL



Nurul Arifin

ANGGOTA Komisi I DPR Nurul Arifin menilai hibah kapal patroli dari Jepang memberi keuntungan untuk memperkuat keamanan laut Indonesia. Kapal ini sangat dibutuhkan mengingat luasnya wilayah perairan dan kompleksitas ancaman.

Nurul menyebut, hibah kapal patroli senilai lebih dari Rp 200 miliar itu jadi tambahan penting bagi TNI Angkatan Laut (AL). Kapal dengan karakter cepat dan lincah itu sangat relevan untuk kebutuhan patroli rutin, sekaligus meningkatkan kemampuan respons TNI AL terhadap ancaman yang bersifat cepat dan dinamis.

"Kapal patroli seperti ini jelas membantu. Wilayah laut kita luas sekali, sementara ancaman di lapangan itu sifatnya cepat dan dinamis," kata politikus Partai Golkar itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Dia bilang, kehadiran kapal patroli hibah akan memperkuat kehadiran negara di wilayah laut yang selama ini rawan terhadap berbagai pelanggaran. Mulai dari penyelundupan, perompakan, pencurian kekayaan alam, hingga penyusupan kapal asing. "Kapal itu efektif mendukung pelaksanaan tugas AL menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut

NKRI," katanya.

Namun dia mengingatkan, manfaat hibah itu harus diimbangi dengan kesiapan jangka panjang. Perawatan berkelanjutan, ketersediaan suku cadang, serta kesiapan sumber daya manusia jadi hal penting, agar kapal patroli dapat dioperasikan secara optimal dalam jangka waktu lama.

"Sekarang kita terbantu, itu tidak bisa dipungkiri. Ke depan harus dipikirkan juga soal perawatan, suku cadang, dan kesiapan SDM kita," katanya.

Dari sisi ekonomi, dia menilai hibah kapal patroli ini juga memberikan efisiensi anggaran karena mengurangi kebutuhan pengadaan alutsista baru. Sementara dalam konteks politik luar negeri, kerja sama dengan Jepang tetap harus ditempatkan dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif.

Nurul juga meminta Pemerintah dan TNI menjadikan hibah tersebut sebagai bagian dari penguatan kapasitas nasional. Termasuk melalui alih pengetahuan dan pelibatan industri dalam negeri. Dengan pengelolaan yang tepat, bantuan itu bisa menjadi keuntungan strategis bagi Indonesia. "Sekaligus mempererat kerja sama bilateral kedua negara di bidang pertahanan dan keamanan," katanya.

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menambahkan, seluruh mekanisme persetujuan hibah telah dipenuhi dan disepakati oleh semua fraksi di DPR. Kendati demikian, Senayan tetap memberi perhatian agar hibah tersebut tidak bersifat mengikat atau berdampak pada upaya negara asing untuk mendikte kebijakan Indonesia.

"Kita underline adalah, jangan sampai bantuan ini mendikte. Jepang adalah sahabat lama kita," jelas legislator PDIP itu. ■ **PVB**



DIALEKTIKA DEMOKRASI: Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Soedeson Tandra (kiri), Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah (tengah) dan Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Azhar Sidiq (kanan) menjadi pembicara Diskusi Dialektika Demokrasi, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Dalam diskusi bertajuk "MKMK Dinilai Tidak Berwenang Batalkan Keppres Pengangkatan MK?", dibahas soal desakan sejumlah akademisi yang tergabung dalam *Constitutional and Administrative Law Society (CALS)* agar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membatalkan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR karena diduga melanggar kode etik.

FOTO: TEDY KROEN/RAKYAT MERDEKA/IMID

Indeks Korupsi Turun 3 Poin

Komisi III: Momentum Evaluasi Strategi Pemberantasan Korupsi

Senayan menyoroti laporan Transparency International Indonesia (TII) yang menyebut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index (CPI)* Indonesia tahun 2025 melorot di skor 34. Turun 3 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 37.

ANGGOTA Komisi III DPR Hasbiullah Ilyas menilai, temuan tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah. Penurunan skor dan peringkat IPK menunjukkan persepsi terhadap korupsi di Indonesia masih buruk.

Dia meminta laporan yang disampaikan TII ini tidak bisa dianggap angin lalu saja. Skor 34 dan turunnya peringkat Indonesia harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. "Ini menunjukkan indeks persepsi korupsi kita masih sangat buruk, bahkan setara dengan Nepal," ujarnya, kemarin.

Diketahui dalam laporan TII, Indonesia menempati peringkat 109 dari 180 negara yang disurvei. Posisi ini merosot dibandingkan tahun 2024, di mana Indonesia berada di peringkat 99. Bahkan, skor Indonesia kini sejajar dengan sejumlah negara seperti Aljazair, Nepal, Malawi, Sierra Leone, Laos, dan Bosnia

& Herzegovina.

Hasbi melanjutkan kondisi ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap strategi pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan. Pemerintah, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya, kudu segera menyusun road map pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

"Tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat pencegahan secara sistematis," tegas politikus PKB ini.

Selain itu, ia mendorong KPK dan aparat penegak hukum lainnya untuk lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi antikorupsi kepada masyarakat. Penguatan budaya antikorupsi harus dimulai dari peningkatan kesadaran publik.

Sosialisasi dan pendidikan antikorupsi juga harus digencarkan, baik di lingkungan



Hasbiullah Ilyas

pemerintahan, dunia usaha, maupun masyarakat luas. "Tanpa kesadaran kolektif, upaya pemberantasan korupsi tidak akan efektif," kata mantan anggota DPRD DKI Jakarta ini.

Komisi III DPR, lanjut Hasbi, akan terus mendorong penguatan regulasi dan pengawasan agar agenda pemberantasan korupsi berjalan lebih optimal dan berdampak nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.

Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta menambahkan, merosotnya skor IPK Indonesia tahun 2025 menjadi alarm keras bagi sistem pencegahan dan penindakan

korupsi di tanah air. Laporan ini sebagai konfirmasi atas suramnya reformasi birokrasi saat ini.

Parta mengatakan, instrumen pemberantasan korupsi yang ada saat ini belum mampu membendung praktik lencang yang telah merambah ke berbagai lini. Mulai dari tingkat desa hingga nasional, bahkan menyentuh institusi peradilan dan Kementerian Agama (Kemendagri).

"Dibutuhkan perubahan reformis dan struktural di berbagai segmen. Juga peran DPR untuk memperkuat fungsi pengawasan dan anggaran," ujar Budi di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Selain itu, Parta menyoroti keterbatasan DPR dalam mengawasi penggunaan APBN pasca-Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 yang menghapus kewenangan legislatif dalam membahas anggaran hingga satuan 3 (rincian program dan alokasi pagu per program). Akibatnya, DPR kini hanya menerima dokumen anggaran dalam bentuk umum.

Politikus PDIP ini mencontohkan, kasus korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Jika DPR memiliki kewenangan

mengawasi hingga Satuan 3, potensi penyimpangan harga satuan bisa dideteksi sejak awal.

Bagaimana tanggapan KPK? Juru Bicara KPK Budi Prasetyo berharap, semua pihak menjadikan hasil itu sebagai bahan untuk koreksi, introspeksi dan akselerasi pemberantasan korupsi ke depan secara kolektif.

Introspeksi perlu dilakukan karena IPK merupakan cerminan kepercayaan publik terhadap komitmen nasional dalam memerangi praktik korupsi. "Juga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan," ujar Budi di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Budi berharap, setiap progresivitas penegakan hukum oleh KPK ditindaklanjuti dengan komitmen dan langkah nyata seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan persoalan korupsi tidak kembali terjadi.

Tak hanya sebagai introspeksi, setelah indeks persepsi korupsi disampaikan, dia berharap ada tindak lanjut konkret untuk menekan praktik korupsi yang hingga kini kian masif. "Hal ini menandakan komitmen perbaikan pada ranah pencegahan masih harus ditingkatkan," pungkasnya. ■ **TIF**

Harapan Calon Mahasiswa Program KIP-K Perlu Diperluas

SENAYAN menilai Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) masih jadi instrumen utama dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Makanya, penguatan program itu krusial untuk mendorong kenaikan angka partisipasi mahasiswa.

Anggota Komisi X DPR Andi Muawiyah Ramly menjelaskan, KIP-K merupakan tumpuan harapan jutaan calon mahasiswa, terutama dari keluarga tidak mampu di luar Pulau Jawa. "Jangan sampai program seksi kita di Komisi X, yaitu KIP, itu terkurangi. Kalau bisa justru ditambah. Ini betul-betul tumpuan harapan mahasiswa kepada kita," ucapnya.

Bantuan pendidikan di tingkat perguruan tinggi melalui program KIP-K tergolong sangat terbatas. Sementara itu, di jenjang dasar dan menengah, Pemerintah sudah menyalurkan dana besar melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan nyata dalam akses pendidikan tinggi bagi generasi muda. "Ketimpangan itu berdampak langsung pada ekonomi dan psikologis," tegasnya.

Dia berharap, tragedi siswa di Nusa Tenggara Timur yang mengakhiri hidupnya karena terkendala biaya pendidikan tidak terulang di masa depan. Dengan perluasan dan peningkatan jumlah KIP-K, risiko calon mahasiswa melakukan bunuh diri akibat kesulitan ekonomi bisa jauh berkurang.

"Mudah-mudahan tidak ada calon mahasiswa yang bunuh diri karena tak bisa masuk perguruan tinggi karena tidak punya biaya," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR

Kurniasih Mufidayati menambahkan, peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi harus dijadikan sebagai agenda nasional. Upaya itu harus dilakukan secara terencana, terukur, dan terintegrasi. Dan program KIP-K sudah berada di jalur yang tepat dalam membuka akses pendidikan tinggi.

Dia bilang, program itu belum cukup jika berjalan sendiri tanpa sinergi dengan skema beasiswa lainnya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiknas) mesti memiliki roadmap beasiswa nasional hingga 2029, lengkap dengan target capaian APK yang jelas. "Dengan begitu, kita bisa melihat seberapa besar kontribusi anggaran beasiswa terhadap peningkatan akses kuliah," ujarnya.

Kurniasih menyoroti perbedaan data APK antara Badan Pusat Statistik dan kementerian terkait, yang sama-sama menunjukkan angka partisipasi masih di bawah 35 persen. Artinya, dari setiap 100 anak usia kuliah, belum sampai 35 orang yang benar-benar mengenyam pendidikan tinggi.

Menurutnya, situasi ini tidak terlepas dari tantangan struktural. Seperti distribusi perguruan tinggi yang masih terpusat di Pulau Jawa, keterbatasan kapasitas kampus, serta kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan tantangan lainnya adalah, kapasitas kampus yang belum seimbang dengan jumlah mahasiswa.

"Selanjutnya, kompetensi lulusan belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Ini harus dijawab secara sistemik, tidak parsial," jelas legislator Fraksi PKS itu. ■ **PVB**

Majalah Industri AMDK

Legislator: Permudah Pengurusan Sertifikat

ANGGOTA Komisi VII DPR Nila Yani Hardiyanti menyoroti persoalan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang tidak hanya soal kepatuhan terhadap standar mutu produk. Isu ini juga berkaitan dengan keadilan kebijakan, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan bagi industri kecil.

Nilai menjelaskan, pengelolaan sumber air yang tidak berkelanjutan, penggunaan kemasan plastik tidak terkontrol, serta lemahnya pengawasan distribusi berpotensi menimbulkan risiko ekologis dan ancaman kesehatan masyarakat. Risiko ini juga bertumbuh dengan menjamurnya industri AMDK skala kecil di daerah.

Perusahaan AMDK, sambung Nila, perlu secara transparan dan terukur memberikan tanggung jawab pada bidang sosial dan lingkungan. Pasalnya, industri ini memberikan dampak masif akibat eksploitasi air tanah yang bisa memicu kekeringan dan krisis air bersih. "Harus ada kepatuhan dan prinsip keberlanjutan secara konkret dari perusahaan AMDK pada isu lingkungan," ucapnya.

Nilai mengungkap, industri

kecil sebenarnya ingin mematuhi aturan, namun sering terhambat oleh biaya sertifikasi, keterbatasan akses laboratorium, dan SDM. Regulasi yang terlalu ketat justru memberi keuntungan bagi perusahaan besar, sementara usaha kecil kesulitan memenuhi standar lingkungan dan keberlanjutan yang sama.

Dalam kondisi ini, kata Nila, ada tiga isu krusial yang perlu jadi perhatian Pemerintah. Pertama, desain kebijakan sertifikasi harus mempertimbangkan skala usaha agar tidak membebani industri kecil. Kedua, penerapan kebijakan lingkungan, termasuk penggunaan kemasan ramah lingkungan, harus dilakukan bertahap dan realistis.

"Kita tidak bisa memaksakan standar lingkungan kelas global, sementara bahan baku, teknologi, dan ekosistem industrinya belum tersedia secara merata di dalam negeri terutama di daerah," tuturnya.

Ketiga, negara diminta hadir tidak hanya dalam hal administratif, tapi juga mendampingi secara teknis dan memfasilitasi akses agar industri kecil



Nilai Yani Hardiyanti

berkembang. Di sini, keberpihakan Pemerintah diuji, apakah kebijakan yang dibuat benar-benar melindungi lingkungan dan konsumen, sekaligus memastikan usaha rakyat tetap hidup dan bertumbuh.

Dia menegaskan, keberhasilan kebijakan AMDK harus diukur dari pertumbuhan industri kecil yang berkelanjutan, kelestarian lingkungan, serta akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan terjangkau. Industri boleh maju, regulasi harus kuat, tapi keadilan dan keberpihakan kepada usaha rakyat tidak boleh dikorbankan.

BUKU BARU

	Judul Buku : Menembus Batas: Revitalisasi Komisi Yudisial dalam Sistem Peradilan Indonesia Penulis : Prof. Adies Kadir Penerbit : RMBooks Halaman : 315 Halaman Harga : Rp75.000,-
	Judul Buku : Paizi Harga : Rp75.000,-
	Judul Buku : Menuju Politik Hukum Baru Harga : Rp75.000,-
	Judul Buku : JOKOWINOMIC Harga : Rp80.000,-
	Judul Buku : RUHANI ASPIRASI Harga : Rp75.000,-
	Judul Buku : GOOD POLITICAL PARTY GOVERNANCE Harga : Rp75.000,-
	Judul Buku : Catatan Seorang Jubir Harga : Rp115.000,-
	Judul Buku : TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA Harga : Rp85.000,-

Jejak Program Prioritas

Berkah Program Gentengisasi Tungku Perajin Genteng Kembali Mengepul, Nurdin Bangkit Lagi

PROGRAM Gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto membuat tungku kembali menyala dan harapan perajin bangkit lagi. Perajin genteng merasakan berkah ketika peluang usaha mulai terbuka, setelah lama sepi pesanan.

Harapan yang sempat redup kini mulai menyala lagi di tengah kampung-kampung sentra produksi.

Asap pembakaran mulai terlihat lagi di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat. Kawasan ini meliputi Kabupaten Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Bagi para perajin, perubahan ini sangat berarti. Mereka yang lama kehilangan pesanan mulai menghitung kemungkinan produksi kembali. Semangat bertahan hidup lewat tanah liat dan tungku pembakaran kembali tumbuh, memberi keyakinan masa depan bisa diperjuangkan lagi.

Bagi sebagian warga, Program Gentengisasi lebih dari sebuah kebijakan. Genteng berarti dapur yang kembali berasap dan tangan-tangan yang kembali sibuk mencetak tanah liat. Setelah bertahun-tahun menunggu perhatian, mereka merasa ada pintu yang terbuka. Suasana inilah yang terasa dalam Sarasehan Ekonomi Kerakyatan di Tasikmalaya.

Di Kampung Ablok, Kelurahan Sinar Galih, Kecamatan Langensari, Kabupaten Banjar, Nurdin merasakan betul perubahan angin itu. Sudah lama dia berhenti membuat genteng karena pesanan makin jarang datang. Untuk bertahan hidup, dia beralih membuat bata tanah sambil menyimpan peralatan lamanya.

"Semoga Pak Presiden memperhatikan perajin kecil yang hampir punah ini," harap Nurdin dikutip Kamis (12/2/2026).

Nurdin masih mengingat masa

ketika produksi genteng mencapai puncaknya pada 2015. Setelah itu, permintaan terus turun dan banyak rekannya memilih berhenti. Kini di wilayahnya, hanya dia yang masih bertahan menjaga tradisi tersebut.

Puluhan perajin lain di Banjar merasakan hal serupa. Mereka menilai Gentengisasi menjadi tanda keberpihakan Pemerintah terhadap usaha rakyat kecil.

Program itu memberi ruang agar pekerjaan lama yang nyaris hilang bisa hidup kembali. Harapan untuk kembali memproduksi dalam jumlah besar mulai dibicarakan.

Pengajar Pascasarjana Universitas Siliwangi Tasikmalaya Edy Suroso memandang program Gentengisasi sebagai langkah strategis Pemerintah. Dia menyebut, Gentengisasi berpijak pada ekonomi kerakyatan yang memanfaatkan sumber daya lokal.

"Industri genteng rakyat menyerap tenaga kerja dan memutar ekonomi lokal," katanya.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia Kota Tasikmalaya Agus Rudianto menilai, penguatan kelembagaan menjadi kunci. Menurut dia, pengrajin kecil perlu payung agar tidak kalah oleh kekuatan modal besar.

"Koperasi harus dikonsolidasikan agar pengrajin mendapat manfaat program," kata Agus.

Selain itu, akses permodalan dan pemasaran juga penting dibenahi. Dia mendorong pelatihan digital agar produk genteng tradisional menjangkau pasar lebih luas.

Dengan dukungan itu, para perajin diharapkan mampu bangkit dan berdiri lebih kuat. Bagi pelaku usaha genteng dan para pekerjanya, program Gentengisasi menjadi momentum yang sudah lama mereka tunggu untuk memulai kembali. ■ **JAR**



Nurdin mengecek hasil produksi genteng tanah liat di rumahnya di Langensari, Banjar. Dok. Tim Media Presiden



Bambang Trismawan/Rakyat Merdeka

HUT Ke-50 APKINDO

Pemerintah Kawal Plywood RI Hadapi Tekanan Global

Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Dalam acara tersebut, Pemerintah menegaskan komitmen mengawal industri kayu lapis nasional agar tetap berdaya saing di pasar global.

PERAYAAN HUT ke-50 APKINDO digelar sederhana dan khidmat. Acara dihadiri Ketua Umum APKINDO Bambang Soepijanto, perwakilan Pemerintah, jajaran pengurus, serta para pengusaha panel kayu dari berbagai daerah.

Hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Erwan Sudaryanto dan Direktur Pengamanan Perdagangan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Reza Pahlevi Chairul. Hadir pula Chief Executive Officer (CEO) Rakyat Merdeka Group Kiki Iswara.

Rangkaian acara diawali dengan sambutan, dilanjutkan pemotongan nasi tumpeng yang diserahkan kepada para senior dan perintis asosiasi sebagai bentuk penghormatan.

Pada kesempatan itu, APKINDO juga memberikan penghargaan kepada *Rakyat Merdeka* sebagai mitra media. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kiki Iswara.

Dalam sambutannya, Bambang Soepijanto menceritakan, APKINDO lahir pada 12 Februari 1976 dari inisiatif 13 pengusaha yang ingin menghadapi dinamika kebijakan dan pasar global secara kolektif. Kebersamaan itu yang membuat industri panel kayu mampu bertahan.

Pada 1995, ekspor panel kayu Indonesia sempat mencapai 8,8 juta meter kubik dengan nilai sekitar 4 miliar dolar AS. Namun pada 2025, ekspor tercatat sekitar 3,74 juta meter kubik atau senilai 2,4 miliar dolar AS. Penurunan tersebut, kata

Bambang, dipicu perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik, serta regulasi baru di sejumlah negara tujuan ekspor. Bambang menjelaskan, tantangan yang dihadapi industri, antara lain kenaikan dana reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Selain itu, saat ini industri menghadapi tarif resiproskal Amerika Serikat sebesar 19 persen untuk produk plywood. Ditambah adanya investigasi anti-subsidi dan anti-dumping.

Tuduhan subsidi, menurut Bambang, muncul akibat perbedaan persepsi terkait sumber bahan baku yang sebagian berasal dari luar kawasan hutan dan tidak dikenai PSDH.

Dia mengakui kondisi tersebut tidak mudah. Pasalnya, Amerika Serikat merupakan pasar utama panel kayu Indonesia. Setelah itu, pasar besar lainnya adalah Jepang, Korea Selatan, China dan negara-negara Eropa.

Dia berharap, Pemerintah dan pelaku usaha solid dalam penyampaian data agar tidak terjadi perbedaan jawaban dalam proses investigasi.

"Saat ini proses investigasi masih berjalan dan kami berharap hasilnya menyatakan tidak ada subsidi sebagaimana yang dituduhkan," harapnya.

Tantangan berikutnya adalah regulasi sertifikasi. Uni Eropa akan memberlakukan European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada 1 Januari 2027. Selain itu, di dalam negeri ada sistem legalitas kayu yang bersifat mandatory. Di India juga berlaku standar baru *Bureau of Indian*

Standards (BIS) sejak 2025.

Hingga kini, belum ada perusahaan panel kayu Indonesia yang memperoleh sertifikat tersebut. Artinya, tantangan bukan hanya tarif, tetapi juga non-tarif barrier yang semakin kompleks.

"Sebagai asosiasi, kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami sangat bergantung pada dukungan Pemerintah, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perdagangan, dan kementerian terkait lainnya," paparnya.

Bambang menyebut delapan kriteria utama dalam sistem legalitas kayu nasional sejatinya sudah terpenuhi. Industri tinggal memperkuat aspek geotagging yang membutuhkan komunikasi kebijakan lebih intensif agar tidak menjadi hambatan dalam ekspor.

Di sisi lain, pencabutan sejumlah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Sumatera turut menjadi perhatian. Kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak pada kelancaran rantai pasok bahan baku bagi industri hilir.

Meski demikian, Bambang tetap optimistis. Dia mengajak anggota Asosiasi tidak hanya bertumpu pada pasar ekspor, tetapi mulai lebih serius menggarap pasar domestik.

Menurutnya, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan peluang. Kebutuhan material untuk hunian, perkantoran, interior hingga fasilitas seperti sound booth, bisa menyerap sekitar 6-7 persen produksi.

"Kalau Eropa hanya sekitar 2-3 persen, kenapa kita tidak fokus juga ke dalam negeri? IKN bisa jadi penyangga saat ekspor melemah," ujarnya.

Dia mengaku telah menyampaikan gagasan tersebut kepada pemerintah agar industri panel kayu nasional masuk dalam rantai pasok proyek strategis nasional.

"Memang ada tantangan harga

dan persepsi material. Tapi kita harus berani mengubah cara pandang. Industri ini bukan hanya bertahan, tapi harus tumbuh," tegasnya.

Ke depan, kata Bambang, yang dibutuhkan adalah kolaborasi yang semakin solid antara asosiasi, pelaku usaha dan Pemerintah. Sebab, industri panel kayu bukan sekadar urusan ekspor, melainkan salah satu penopang penting perekonomian nasional.

Di tempat yang sama, Direktur Pengamanan Perdagangan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Reza Pahlevi Chairul menegaskan, Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi investigasi anti-subsidi dan anti-dumping dari Amerika Serikat.

"Semakin besar industrinya, tantangannya semakin kompleks. Tapi pemerintah hadir untuk memberikan dukungan penuh," ujar Reza.

Dia menjelaskan, otoritas Amerika Serikat telah mengeluarkan keputusan sementara (preliminary determination), tapi belum final. Pada Maret mendatang, tim Amerika Serikat dijadwalkan melakukan verifikasi langsung ke perusahaan-perusahaan di Indonesia. Keputusan akhir diperkirakan terbit sekitar Juni 2026.

"Kami terus melakukan pembelaan dan koordinasi lintas kementerian agar kepentingan industri nasional tetap terlindungi," tegasnya.

Menurut Reza, tuduhan subsidi dan praktik dumping masih dalam tahap pembuktian. Jika terbukti, produk plywood Indonesia berpotensi dikenai bea masuk tambahan yang bisa berlipis dengan kebijakan tarif lainnya.

"Ini belum final. Masih ada tahapan verifikasi dan klarifikasi. Kita kawal bersama," ujarnya.

Dia menambahkan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan untuk memastikan data dan jawaban yang

SERAHKAN PLAKAT: Ketua Umum Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) Bambang Soepijanto (kanan) menyerahkan plakat penghargaan kepada Chief Executive Officer (CEO) Rakyat Merdeka Group Kiki Iswara (kedua kanan) saat peringatan HUT ke-50 APKINDO di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Penghargaan juga diberikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan Erwan Sudaryanto (kedua kiri) dan Direktur Pengamanan Perdagangan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Reza Pahlevi Chairul (kiri).

Di Rakornas Kemendukbangga

Wihaji: Investasi Keluarga Fondasi Program Prabowo

MENTERI Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan, investasi pada keluarga merupakan fondasi utama dari seluruh program prioritas nasional. Hal ini krusial untuk memastikan setiap kebijakan Pemerintah benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

"Pembangunan keluarga adalah fondasi dari seluruh program prioritas Presiden Prabowo di tahun 2026," ujar Wihaji saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kemendukbangga, Bangga Kencana di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Wihaji merinci, berbagai program prioritas mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, energi, hingga kesehatan

berkualitas, semuanya bermula pada unit terkecil yaitu keluarga. Tanpa penguatan di tingkat keluarga, kapitalisasi bonus demografi yang saat ini mencapai 70 persen penduduk usia produktif tidak akan berjalan maksimal.

"Bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika mampu kita kapitalisasi secara tepat," ucapnya.

Di hadapan ribuan peserta yang *online* dan *offline*, Wihaji mengibaratkan kementerian yang dipimpinnya seperti sebuah grup musik gamelan. Baginya, urusan kependudukan dan pembangunan keluarga tidak bisa dimainkan secara solo, melainkan harus diorkestrasikan bersama berbagai kementerian, lembaga, hingga organisasi masyarakat.

Mantan Bupati Batang ini mengingatkan, tugas negara adalah mengurus seluruh sik-

lus kehidupan manusia, mulai dari bayi hingga lansia. Data kementerian mencatat ada 80 juta keluarga yang terdata secara rinci, termasuk 14 juta keluarga dengan kepala keluarga perempuan serta 25 juta keluarga yang memiliki anggota lansia.

"Semua bagian dari siklus kehidupan yang harus kita urus secara komprehensif," tuturnya.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada kelompok non-ASN, pekerja informal, hingga ibu rumah tangga agar memiliki jaminan sosial dan perlindungan hari tua.

Dia menilai, sistem pensiun dan jaminan sosial yang kuat merupakan bentuk investasi jangka panjang negara untuk memperkuat ketahanan demografi dan ekonomi nasional.



Wihaji

lapisan masyarakat," katanya.

Mengenai akses kesehatan, Wihaji memastikan hak warga negara terhadap alat kontrasepsi atau KB tetap terpenuhi sesuai amanat Undang-Undang Nomor

52 Tahun 2009. Meski angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) saat ini sudah berada di angka 2,18, pelayanan KB tetap dibutuhkan untuk menekan angka kelahiran yang tidak diinginkan demi kesehatan fisik dan mental ibu.

"Kami akan terus mencari solusi terbaik dalam memastikan akses alat kontrasepsi," jelasnya.

Wihaji juga merespons isu pembiayaan alat kontrasepsi. Pemerintah, kata dia, tetap menjamin hak warga memperoleh layanan tersebut. Mandat itu sudah diatur dalam undang-undang. Kebutuhan akan disesuaikan kemampuan anggaran.

"Kami memiliki kewenangan menyiapkan alat kontrasepsi," ujarnya.

Dia menilai, pembicaraan kependudukan kini bukan hanya soal angka kelahiran. Fokus uta-

ma memastikan akses masyarakat tetap terbuka. Perempuan harus mendapat kesempatan hidup sehat. Dimensi ekonomi pun ikut dipertimbangkan.

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Prof. Budi Setiyono menambahkan, tahun 2026 merupakan masa krusial dalam transformasi organisasi kementerian.

Rakornas ini bertujuan menyalurkan kebijakan strategis pusat dan daerah, termasuk sinkronisasi program prioritas seperti MBG dengan percepatan penurunan stunting.

"Kita dituntut bergerak lebih cepat, tepat serta terintegrasi," tuturnya.

Program pembangunan keluarga ini juga melibatkan kerja sama lintas sektor yang melibatkan 597 ribu orang Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh Indonesia.

Kolaborasi ini melibatkan kementerian terkait seperti Kemendagri, Kementerian Sosial, hingga mitra strategis seperti BPJS Ketenagakerjaan dan perguruan tinggi untuk memperkuat lini lapangan.

"Pembangunan keluarga adalah kerja kolaboratif yang melibatkan banyak mitra strategis," jelasnya.

Melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJKP) yang mencakup 32 indikator, Pemerintah optimistis stabilitas demografi dapat terjaga.

Wihaji berharap, orkestrasi besar ini mampu menciptakan keluarga berkualitas yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata di masa depan.

"Keluarga sehat dan kuat menjadi kunci bagi Indonesia sejahtera," tutupnya. ■ **JAR**

ATR/BPN Gandeng STPN Percepat Restorasi Arsip Pertanahan

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) untuk mempercepat restorasi arsip pertanahan pascabencana.

Kolaborasi ini dilakukan melalui pelibatan taruna STPN dalam program Kuliah Kerja Nyata Pertanahan-Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP), sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan dokumen negara dan pelayanan publik di bidang pertanahan.

Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN Awaludin menjelaskan, keterlibatan taruna STPN menjadi elemen penting dalam menjaga eksistensi arsip pertanahan yang terdampak bencana.

Menurutnya, arsip pertanahan memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

"Ketika kalian membantu merestorasi arsip pascabencana, sejatinya kalian sedang ikut menjaga ingatan negara dan memastikan pelayanan pertanahan berjalan dengan baik, tertib, akuntabel dan berkelanjutan," ujar Awaludin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Awaludin yang mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN secara resmi menerima sekaligus menyerahkan 30 taruna STPN yang akan

melaksanakan KKNP-PTLP.

Dia menyampaikan, dampak bencana yang menimpa Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Aceh Tamiang mengharuskan proses restorasi arsip sementara dilakukan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

"Insya Allah dalam empat bulan ke depan, para taruna dapat menyelesaikan restorasi arsip yang terdampak bencana," ucap Awaludin.

Menurutnya, arsip pertanahan tidak sekadar tumpukan dokumen administratif. Di dalamnya terkandung nilai sejarah, hak keperdataan, serta keadilan bagi masyarakat.

Melalui program KKNP-PTLP, taruna STPN akan membantu pemulihan arsip pertanahan sepanjang kurang lebih 780,6 meter linier.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Aceh Arinaldi mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam upaya pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumatera Utara.

Taruna STPN ditugaskan secara khusus untuk membantu percepatan restorasi arsip pertanahan yang terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang.

Arinaldi mengatakan, ke depan pihaknya juga akan melaksanakan sensus pertanahan dengan melibatkan masyarakat. Langkah ini bertujuan menghimpun kembali arsip yang tidak dapat diselamatkan sekaligus melakukan verifikasi fisik bidang tanah. ■ ASI

Jajaki Kerja Sama Dengan Inggris Kemendes PDT Genjot Listrik Desa Terpencil

KEMENTERIAN Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menjajaki kerja sama percepatan penyediaan listrik perdesaan, sekaligus pembangunan desa bersama 15 delegasi Chief Executive Officer (CEO) perusahaan inovasi energi dan teknologi asal Inggris.

Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan solusi energi yang tepat guna dan aplikatif bagi desa-desa di Indonesia, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, pertemuan tersebut digelar di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Hal ini sebagai langkah awal membuka peluang kerja sama internasional yang berdampak langsung bagi masyarakat desa.

"Kami ingin kolaborasi ini menghasilkan solusi yang benar-benar bisa dipakai di desa," ujar Yandri dalam keterangan resminya, Kamis (12/2/2026).

Sebanyak 15 delegasi CEO asal Inggris hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka berasal dari berbagai perusahaan inovasi energi, antara lain Carruthers Renewables yang bergerak di bidang mikrohidro off-grid, Centre for Energy Equality (CEE) dengan solusi energi inklusif, Eja-Ice yang fokus pada rantai dingin ber-

basis tenaga surya untuk sektor pangan dan kesehatan, Propel and Power dengan teknologi turbin laut tanpa baling-baling untuk wilayah pesisir, serta Compact Syngas Solutions yang mengembangkan teknologi pengolahan limbah menjadi energi.

Dijelaskan, sejumlah isu dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, perhatian utama diarahkan pada solusi praktis penyediaan listrik perdesaan di wilayah terpencil dan kepulauan.

Pembahasan mencakup pengembangan sistem energi terbarukan terdesentralisasi, penguatan pasokan listrik bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih, hingga dukungan energi untuk sistem cold chain pangan serta layanan dasar desa.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyampaikan, Kemendes memiliki 12 program prioritas yang berpotensi dikolaborasi dengan perusahaannya-perusahaan asal Inggris tersebut. Salah satunya, program desa ekspor yang ditargetkan membangun 5 ribu desa ekspor berbasis keunggulan dan keragaman potensi lokal.

"Kami juga memiliki program desa tematik yang menyesuaikan potensi desa sebagai penyuplai bahan baku program Pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis," ungkapnya. ■ SSL



DOK. KEMENKO PANGAN

KEPALKAN TANGAN: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (ketujuh kanan) berfoto bersama pengurus dan jajaran TNI, usai meninjau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kedungpedaringan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (12/2/2026).

Tinjau Kesiapan KDMP Malang

Zulhas Dorong Ekonomi Tumbuh Dari Masyarakat

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kedungpedaringan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (12/2/2026).

DALAM kunjungan tersebut, Zulhas-sapaan Zulkifli Hasan didampingi Komandan Kodim 0818/Malang-Batu Mayor Czi Sulton, jajaran Babinsa, serta pengurus koperasi desa.

Zulhas memuji kondisi bangunan KDMP yang dinilai telah siap difungsikan. Dia menyebut pembangunan fisik koperasi tersebut telah selesai sepenuhnya.

"Hasil peninjauan menunjukkan pembangunan fisik KDMP telah rampung 100 persen dan

siap beroperasi dalam waktu dekat," kata Zulhas.

Menurutnya, KDMP Kedungpedaringan diharapkan mampu menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat desa, mulai dari sembako, pupuk, hingga produk UMKM. Dengan begitu, pusat aktivitas dan perputaran ekonomi desa dapat terpusat di koperasi.

"Itulah yang dikatakan Bapak Presiden, gerakan ekonomi rakyat. Ekonomi itu harus tumbuh dari rakyat," tegasnya.

Zulhas menjelaskan, koperasi desa akan berperan sebagai *off-taker* bagi UMKM lokal sekaligus pemasok kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SP-PG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Skema ini dirancang agar rantai distribusi tidak lagi bergantung pada grosir besar.

Adapun, Pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 gerai KDMP di seluruh Indonesia dipercepat dan rampung pada Juni 2026.

"Nanti koperasi desa akan menjadi uptaker (penyerap) hasil pertanian masyarakat untuk menyuplai kebutuhan di SPPG sebagai penunjang MBG. Baik koperasi (KDMP), BUMDes,

UMKM, maupun usaha kecil lainnya akan terlibat sebagai pemasok," jelasnya.

Zulhas mengapresiasi peran TNI, khususnya Babinsa, dalam membantu percepatan pembangunan gedung KDMP.

Dia menegaskan, koperasi desa menjadi penggerak ekonomi berbasis gotong royong, kemandirian dan ekonomi kerakyatan, sekaligus motor penguatan ekonomi dan sosial masyarakat desa secara berkelanjutan.

Kasdim 0818 Mayor Czi Sulton menegaskan, komitmen Kodim 0818/Malang-Batu untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder dalam mendukung program ke-

tahanan pangan nasional.

"Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Malang," katanya.

Sementara, Sekretaris I Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Kabupaten Malang Mahila Surya Dewi menambahkan, atensi dari Menko Pangan dalam kunjungan kerja kali ini ingin memastikan setiap SPPG nantinya diharapkan belanja di KDMP termasuk ke UMKM.

"SPPG jangan jauh-jauh mengambil bahan baku dan lebih mengutamakan pada ekonomi kerakyatan," ucapnya. ■ KPMJ

Pesan Kapolri Di Retret KOKAM Muhammadiyah

Sinergi Jadi Fondasi Jaga Persatuan Dan Kamtibmas



DOK. POLRI

RETRET KOKAM MUHAMMADIYAH: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (tengah) menghadiri Retret Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda (KOKAM) Muhammadiyah di Satuan Latihan Brimob Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/2/2026). Dalam kegiatan itu, Kapolri hadir sebagai keynote speaker pada pembukaan Retret KOKAM Nasional.

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan, kesatuan, serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai fondasi pembangunan nasional.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri Retret Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda (KOKAM) Muhammadiyah di Satuan Latihan Brimob Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/2/2026).

Dalam kegiatan itu, Kapolri hadir sebagai keynote speaker pada pembukaan Retret KOKAM Nasional.

Sigit menyampaikan, Polri khususnya Korps Brimob, terus membuka ruang sinergi dengan KOKAM dan Pemuda Muhammadiyah.

"Ini bagian dari komitmen Polri, khususnya Brimob dan seluruh jajaran, terus bersinergi dengan KOKAM dan Pemuda Muhammadiyah dalam menjaga persatuan-kesatuan serta stabilitas kamtibmas," ujar Kapolri.

Menurutnya, persatuan bangsa dan situasi keamanan yang kondusif merupakan modal utama dalam mewujudkan harapan Presiden

Prabowo Subianto untuk Indonesia yang berdaulat, sejahtera, serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Semua itu membutuhkan stabilitas kamtibmas dan persatuan dari seluruh elemen bangsa," katanya.

Kapolri juga menegaskan, sinergisitas antara Polri dan Muhammadiyah telah terbangun kuat sejak lama dan terus teruji, termasuk dalam menghadapi berbagai situasi sulit.

"Peran Muhammadiyah sangat luar biasa. Kami bersama Muhammadiyah dalam berbagai kegiatan. Mulai dari menghadapi bencana, situasi darurat, hingga ancaman-ancaman lain, termasuk pengamanan agenda nasional maupun internasional," tutur Kapolri.

Menurutnya, Polri dan Muhammadiyah juga kerap berdamai ketika stabilitas kamtibmas menghadapi tantangan.

Kapolri berharap, sinergi dan kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat demi kemajuan bangsa.

"Bagi kami, Muhammadiyah adalah sahabat sejati. Hubungan ini akan terus terjaga dan apa yang sudah kita lakukan bersama selama ini harus dipertahankan serta ditingkatkan," tutupnya. ■ ASI

Dengue Di ASEAN Dan Indonesia

PROF. TJANDRA YOGA ADITAMA

RAKYAT MERDEKA (RM.id), 10 Februari 2026, menurunkan berita berjudul "Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Regional Lawan Dengue ASEAN".

Dalam berita tersebut disebutkan bahwa forum regional ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas negara, lintas sektor, dan lintas pemangku kepentingan.

Forum ini juga mendorong penyeragaman kebijakan serta adopsi strategi pencegahan dan pengendalian dengue yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Berita itu mengingatkan saya pada tahun 2011, ketika saya menjabat sebagai Dirjen Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dan menyelenggarakan ASEAN Dengue Conference yang dihadiri 150

peserta dari seluruh negara ASEAN.

Konferensi tersebut antara lain bertujuan untuk bertukar informasi dan pengalaman negar-negara anggota ASEAN dalam pengendalian dengue, kegiatan penelitian, pembentukan jejaring regional, serta peningkatan komitmen pemerintah masing-masing negara anggota.

Pada akhir konferensi, para peserta berhasil merumuskan "Jakarta Call for Action on Combating Dengue", yang kemudian menjadi acuan penanggulangan dengue di kawasan ASEAN.

Jakarta Call for Action ini dicanangkan pada peluncuran resmi Hari Dengue ASEAN (ASEAN Dengue Day) tanggal 15 Juni 2011 di Museum Nasional Jakarta. Peringatan Hari Dengue ASEAN 2011 di Jakarta merupakan

yang pertama kali dilakukan, setelah sebelumnya ditetapkan dalam 10th ASEAN Health Ministers Meeting tahun 2010, yang juga saya hadiri.

Sayangnya, sejak 2011 hingga 2025, dengue masih menjadi masalah kesehatan penting di ASEAN, termasuk di Indonesia, bahkan di dunia.

WHO menyebutkan sekitar separuh penduduk dunia berisiko tertular dengue. Data yang dilaporkan ke WHO menunjukkan peningkatan yang sangat jelas: dari 505.430 kasus pada tahun 2000 menjadi 14,6 juta kasus pada 2024.

Artikel berjudul "Global dengue epidemic worsens with record 14 million cases and 9000 deaths reported in 2024" yang dipublikasikan di International Journal of Infectious Diseases edisi September 2025 menyebutkan bahwa kasus dengue meningkat dua kali lipat dalam satu tahun, dari 7 juta kasus pada



2023 menjadi lebih dari 14 juta kasus pada 2024.

Artikel tersebut mencatat angka kematian (case fatality rate/CFR) dengue di dunia sebesar 0,07 persen.

Sementara itu, berdasarkan berita RM.id, pada 2024 Indonesia mencatat 257.271 kasus dengue dengan lebih dari 1.400 kematian.

Pada 2025 tercatat 161.752 kasus dengan 673 kematian.

Artinya, angka kematian (CFR) pada 2024 sekitar 0,5 persen dan pada 2025 sekitar 0,42 persen.

Memang terdapat penurunan pada 2025 dibanding 2024. Namun, angka ini masih jauh lebih tinggi dibanding CFR dengue global yang sebesar 0,07 persen.

Tingginya angka kematian dengue di Indonesia sejalan dengan catatan Kemenkes RI bahwa Indonesia menyumbang sekitar 66 persen dari total kematian akibat dengue di Asia dan menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus tertinggi di kawasan.

Artinya, masih diperlukan kerja keras untuk menurunkan angka kematian akibat dengue, terlebih jika ingin mencapai target Zero Dengue Deaths pada 2030.

Di tingkat ASEAN juga terdapat upaya kuat menuju penurunan kematian, sesuai tema Hari Dengue ASEAN 2025: "ASEAN

United: Zero Dengue Deaths, a Future We Build Together."

Secara umum, setidaknya ada sembilan langkah penting dalam pengendalian dengue di dunia, di ASEAN, maupun di Indonesia.

Pertama, pengendalian vektor (nyamuk), termasuk melalui gerakan 3M Plus yang dilakukan secara konsisten dengan dukungan pengelola kesehatan dan partisipasi aktif masyarakat.

Kedua, surveilans yang baik agar pola epidemiologis dapat dipantau dan tindakan cepat dilakukan bila terjadi peningkatan kasus. Program juga perlu disesuaikan dengan fluktuasi perubahan iklim.

Ketiga, deteksi dini kasus, termasuk menjamin ketersediaan alat diagnostik seperti rapid diagnostic test (RDT). Keempat, sistem rujukan yang baik agar pasien memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan. Kelima, pelayanan optimal di rumah sakit untuk kasus berat.

Keenam, perluasan cakupan dan peningkatan mutu vaksinasi.

Ketujuh, penggunaan pendekatan inovatif seperti nyamuk Wolbachia dan metode lainnya. Kedelapan, respons cepat dalam penanganan wabah agar segera terkendali dan tidak meluas. Kesembilan, komitmen politik yang kuat untuk pengendalian dengue.

-Direktur Pascasarjana Universitas YARSI/Adjunct Professor Griffith University, Australia -Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara -Mantan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Kepala Balitbangkes

-Penerima Rakyat Merdeka Award 2022 Bidang Edukasi dan Literasi Kesehatan Masyarakat -Penerima Rekor MURI April 2024

Penerima Penghargaan Paramakarya Paramahusada 2024 -PERSI Penerima Penghargaan Ach



PENGAWASAN PANGAN TERPADU JELANG IMLEK DI JAKARTA: Petugas mengambil sampel produk pangan saat melakukan Pengawasan Pangan Terpadu di Lotte Mart Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (12/12/2026). Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta bersama BPOM DKI Jakarta melaksanakan pengawasan pangan khususnya pada produk UMKM dan makanan olahan di pasar swalayan untuk memastikan keamanan dan kelayakan produk pangan yang dikonsumsi masyarakat jelang Tahun Baru Imlek 2026.

Vox Populi

Keadilan Tak Netral

... DARI HALAMAN 1

tampak netral, tetapi struktur tetap berat sebelah.

John Rawls mengusulkan prinsip perbedaan—bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan yang paling tidak beruntung (*A Theory of Justice*, 1971). Prinsip ini menantang netralitas kosong. Keadilan harus berpihak pada yang rapuh agar setara benar-benar tercapai.

Keberpihakan bukan berarti diskriminasi: ia adalah koreksi atas ketimpangan. Negara perlu alat untuk mem-

baca konteks: siapa yang kehilangan lebih banyak, siapa yang menanggung risiko terbesar, siapa yang tak punya suara. Tanpa pembacaan ini, keputusan netral akan selalu lebih nyaman bagi yang sudah kuat.

Keadilan tak netral karena realitas tak netral. Jika negara mengakui ini dan berani bertindak, kepercayaan akan tumbuh. Jika tidak, konflik akan berulang dengan wajah berbeda. Netralitas yang sejati adalah keberanian menegakkan keseimbangan—bukan sekadar berdiri di tengah dan berharap semuanya selesai sendiri. ■

Masjid IKN Berstandar

... DARI HALAMAN 1

pustakaan digital, ruang pertemuan, serta area komersial untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Karena itu, masjid ini juga dapat menjadi pusat peradaban.

Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito menyatakan, Masjid IKN siap difungsikan saat Ramadan 1447 H. Masjid IKN sudah dapat dipergunakan untuk salat lima waktu, Salat Jumat, hingga kajian khusus Ramadan.

"Salat Tarawih dan Salat Idul Fitri saat Salat Subuh berjemaah, Minggu (11/1/2025). Selain mengimami, Menag juga memberikan ceramah Subuh.

Sejumlah kegiatan Ramadan 2026 juga sudah disiapkan dilaksanakan. Seperti Bazar Ramadan, buka puasa bersama, pusat jajanan takjil atau makanan serta minuman berbuka puasa, kajian Subuh, kultum Tarawih, pengajian khusus Gen-Z maupun ibu-ibu, dan peringatan Nuzulul Quran.

Suwito mengatakan, kegiatan Ramadan juga disiapkan di 12 masjid dan 37 musala di kawasan perkantoran, Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), hingga rumah susun di kawasan IKN.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i juga memastikan kesiapan Masjid IKN untuk digunakan Salat Tarawih pada awal Ramadan nanti. Hal itu disampaikan usai melakukan peninjauan sembari menjadi imam Salat Subuh di masjid tersebut, Kamis (12/2/2026).

"Kami bersyukur hari ini dapat bekerja dan melakukan peninjauan ini. Peninjauan ini kami lakukan untuk memastikan kesiapan masjid, khususnya menjelang rencana pelaksanaan salat tarawih pada awal Ramadan di

kawasan IKN," ujar Wamenag.

Ia lalu mengungkap rencana Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melaksanakan Salat Tarawih dan menyampaikan tausiyah di Masjid IKN pada 2 Ramadan 1447 H.

"Bapak Menteri secara khusus meminta saya memastikan bahwa pada 2 Ramadan sudah dapat melaksanakan Salat Tarawih dan menyampaikan tausiyah di masjid ini. Setelah peninjauan, Insya Allah target tersebut dapat tercapai," kata Wamenag.

Sebelumnya, Masjid Negara IKN sudah digunakan Menag Nasaruddin Umar saat Salat Subuh berjemaah, Minggu (11/1/2025). Selain mengimami, Menag juga memberikan ceramah Subuh.

Saat itu, Menag menerangkan Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini relevan dalam konteks pembangunan IKN. Ayat ini mengisahkan penunjukan manusia sebagai khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi.

Pesan ini menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak boleh dipandang sebagai penaklukan terhadap alam, melainkan sebuah amanah untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Konsep khalifah dalam konteks IKN diterjemahkan sebagai kerja-kerja keberlanjutan yang menyelaraskan antara ketakwaan spiritual dengan tanggung jawab ekologis.

Menurut Menag, dalam sudut pandang ini, IKN adalah laboratorium moral bagi manusia Indonesia dalam menjalankan fungsi kekhilafahan secara modern.

Mengenai Masjid Negara, Menag menyebut sebagai yang tercantik di Indonesia. Menag pun meminta kepada Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memanfaatkan masjid ini di Ramadan 1447 H. ■ MEN

Kasus Pengecualian

... DARI HALAMAN 1

sekarang.

Sebagai perbandingan, praktik khitan anak perempuan yang hanya berupa goresan simbolis saja sudah menuai kritik tajam dari aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) karena dianggap sebagai mutilasi. Apalagi jika setiap kepala keluarga harus mengurbankan anak kandungnya sendiri, sebagaimana yang pernah berlaku di beberapa kabilah Timur Tengah pada masa silam.

Penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap anaknya tidak boleh dijadikan dasar atau alat pembenaran bagi seorang ayah untuk menynka atau menyakiti anak kandungnya.

Semangat yang dapat dipetik dari transisi kurban manusia (*human sacrifice*) menjadi kurban binatang (*animal sacrifice*) adalah sebuah pesan

moral: setiap orang pasti memiliki sesuatu yang paling ia cintai.

Pertanyaannya, bersediaah ia mengorbankan objek kecintaannya itu demi Tuhan? Dalam keyakinan agama-agama Abrahamik (Abrahamic Religions), penyembahan dan pengabdian kepada Tuhan harus di atas segalanya. Objek yang paling dicintai Nabi Ibrahim saat itu adalah putra tunggalnya.

Bagi kita di masa kini, objek kecintaan itu mungkin bukan lagi anak, melainkan jabatan, harta, kekuasaan, atau properti lainnya. Relakah kita mengorbankan hal-hal tersebut demi kecutaan kita kepada Tuhan?

Kasus penyembelihan ini juga tidak bisa dijadikan alasan untuk mendiskreditkan agama tertentu. Sebab, tujuan utamanya bukanlah penghilangan nyawa anak, melainkan manifestasi dari bentuk komitmen puncak seorang hamba terhadap Tuhannya. ■

Penerimaan Pajak Januari 2026 Tumbuh 30 Persen

Purbaya Jamin

... DARI HALAMAN 1

triliun, serta hibah Rp 660 miliar.

Sementara itu, sepanjang Januari 2026, realisasi penerimaan pajak tumbuh 30 persen secara tahunan (*year-on-year/yoy*) menjadi Rp 116,2 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp 88,9 triliun.

Purbaya menyatakan, setelah kuartal II-2026 pihaknya akan menghitung proyeksi penerimaan pajak hingga akhir tahun. Hasil perhitungan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pembiayaan utang, apakah sesuai target penarikan utang di APBN 2026 sebesar Rp 832 triliun atau justru dapat dikurangi.

Ia juga mengungkapkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki kas

sekitar Rp 270 triliun di luar anggaran yang dapat digunakan untuk mengurangi penerbitan surat utang. Namun, dana tersebut direncanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Dengan utang yang sama, rasio utang terhadap PDB akan turun. Itu yang saya mau, bukan tiba-tiba dipotong semua lalu ekonomi tidak bergerak," ujar mantan Ketua Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut.

Purbaya menegaskan komitmen menjaga defisit di bawah 3 persen bukan sekadar optimisme, melainkan bagian dari strategi memperkuat fondasi ekonomi nasional. Ia mengaku memahami langkah-langkah yang perlu diambil berdasarkan pengamatannya terhadap perekonomian Indonesia selama 25 tahun terakhir.

"Ini bukan optimisme semata. Ini sesuatu yang akan terjadi karena kita

benar-benar mengubah fondasi ekonomi kita. Akan berbeda dibanding 20 tahun lalu," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Jada Agung menegaskan disiplin defisit menjadi pijakan utama dalam merancang kebijakan penerimaan negara.

"Saya perlu tekankan, kita akan terus memastikan defisit itu di bawah 3 persen," ujarnya dalam acara CNBC Indonesia Outlook, Selasa (10/2/2026).

Kemenkeu telah menyiapkan tiga strategi untuk mengejar target penerimaan dan menjaga defisit tetap terkendali. Pertama, mendorong kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi, termasuk penerapan Coretax dan sistem digital lainnya guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan.

Kedua, menekan kebocoran penerimaan negara dari sektor pajak, bea dan

cukai, maupun PNPB. Langkah ini dinilai krusial dalam jangka pendek untuk mengamankan basis penerimaan.

"Ini yang menjadi fokus kita dalam jangka pendek, bagaimana kebocoran ini bisa terus kita kurangi," jelas Jada.

Ketiga, mengintensifkan pengawasan terhadap praktik *under-invoicing* dalam kegiatan ekspor dan impor yang selama ini dinilai belum tersentuh secara optimal dan menyebabkan potensi penerimaan dari PNPB maupun cukai tidak maksimal.

Untuk diketahui, pada 2025 defisit tercatat mencapai Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB. Angka tersebut mendekati batas maksimum 3 persen dan lebih tinggi dari target APBN 2025 sebesar 2,53 persen maupun outlook 2,78 persen. Defisit tersebut juga melebar dibandingkan realisasi 2024 sebesar 2,29 persen dari PDB. ■ MEN

Sudah 20 Kampus Buat Teknologi Pengelolaan Sampah

Kampung Nelayan

... DARI HALAMAN 1

Ia menyebut ada tujuh pejabat yang dipanggil mengikuti rapat tersebut. "Katanya ada tujuh orang yang diundang," ujarnya.

Brian memaparkan, sejumlah perguruan tinggi telah mulai menerapkan sistem pengolahan sampah skala mikro. Program ini menjadi bagian dari target pemerintah agar sampah bisa dikelola tuntas di lingkungan kampus.

"Sudah banyak. UGM sudah, Undip sudah, ITB baru akan mulai. Mungkin ada sekitar 20 kampus yang sudah menerapkan. Tahun ini kita dorong agar sampah di kampus selesai di kampus," jelasnya.

Pemerintah menargetkan 100 perguruan tinggi menjalankan program pengelolaan sampah mandiri sepanjang 2026. "Kita harapkan 100 kampus tahun ini buat program sampah di kampus selesai di kampus," ujar Brian sambil berlalu memasuki ruang rapat.

Rapat berlangsung hampir tiga jam. Selesai pertemuan, Brian mengungkapkan pembahasan lebih banyak menyoroti program di sektor kelautan dan perika-

nan. Menteri Trenggono disebut paling banyak memaparkan rencana pengembangan.

"Tadi kebetulan Pak Menteri KP yang banyak menyampaikan," ujar Brian.

Menurutnya, kementeriannya diminta menyiapkan dukungan sumber daya manusia untuk menopang pengembangan industri perikanan yang akan diperluas pemerintah.

"KKP nanti akan banyak mengembangkan kampung nelayan, kemudian juga ada Jaladri. Karena nanti akan banyak dibuka industri-industri perikanan," tegasnya.

Ia menegaskan pentingnya keterseediaan tenaga kerja kompeten sesuai kebutuhan sektor tersebut. "Sesuai dengan kebutuhan yang akan dijalankan oleh Menteri KP," jelas Brian.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Trenggono mengaku melaporkan perkembangan program Kampung Nelayan Merah Putih dalam rapat. Ia menyebut progres pembangunan tahap pertama telah mencapai sekitar 50 persen.

"Mudah-mudahan bisa segera selesai," harap Trenggono.

Pada tahap pertama, terdapat 65 titik Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah dibangun di berbagai daerah.

Selain itu, pihaknya juga melaporkan pembangunan tambak sebagai bagian dari penguatan sektor hulu.

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menjelaskan dukungan perusahaan pelat merah melalui skema besar bernama Jaladri. Program ini difokuskan pada optimalisasi potensi laut dan peningkatan produktivitas industri perikanan.

"Desa nelayan ini dibangun, tetapi secara bisnis tentu harus kita siapkan *off-taker*-nya. Nanti akan ada industri perkapalan yang juga menjadi tanggung jawab kami," terang Dony.

Menurutnya, konsolidasi galangan kapal di bawah PT PAL ditargetkan rampung pada semester pertama tahun ini. "Tahun ini saya pastikan selesai, mungkin semester satu sudah selesai," tegasnya.

Selain memperkuat sektor hulu, Jaladri juga akan mendorong pengembangan industri turunan perikanan di sisi hilir. Dony optimistis program ini membuka lapangan kerja baru secara signifikan.

"KKP membangun desanya, kami menyiapkan ekosistemnya. Ini integrasi komprehensif dalam pengelolaan laut dan pemberdayaan nelayan," pungkasnya. Sehari sebelumnya, Presiden telah

menggelar rapat terbatas di Istana membahas soal teknologi pengolahan sampah skala mikro. Brian yang ikut dalam rapat mengatakan, Presiden meminta agar kementeriannya mempercepat teknologi pengolahan sampah skala mikro yang telah dikembangkan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Adapun teknologi tersebut sebagai pelengkap program *Waste to Energy* yang telah berjalan.

"Beberapa teknologi pengolahan sampah skala mikro yang memang sudah dikembangkan di beberapa kampus tadi diminta oleh Bapak Presiden untuk dilakukan percepatan," kata Brian, Rabu (11/2/2026).

Menurut Brian, sejumlah teknologi tersebut saat ini telah berjalan dan siap untuk dipercepat implementasinya melalui uji coba di berbagai daerah. Brian menuturkan pengembangan ini akan dilakukan secara terintegrasi dengan Danantara guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.

"Ada beberapa teknologi tadi dibicarakan, kita akan segera pilih dan juga akan berjalan bersama Danantara sehingga nantinya penanganan sampah juga akan berjalan di level-level mikro, di tingkat kelurahan lebih efektif," ungkapnya. ■ UMM

Pengamat: Peluang Golkar Usung Cawapres Besar

Bahlil Pilih Nyaleg

... DARI HALAMAN 1

deklarasikan diri tidak akan maju pada perhelatan Pilpres 2029 dan memilih berjuang merebut kursi anggota DPR di Senayan.

"Ketua Umum kami mau nyaleg, sudah men-*declare* beliau akan menjadi caleg untuk 2029," kata Sarmuji, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Bahlil telah memilih Daerah Pemilihan (Dapil) Papua sebagai lokasi pencalonannya. Alasannya, Papua memiliki kedekatan historis dengan Bahlil.

"Pak Bahlil sudah memilih Dapil Papua. Karena Pak Bahlil kan dibesarkan di Papua. Kalau kelahirannya di Banda (Maluku Tengah), tapi besar di Papua," kata Sarmuji.

Karena itu, Bahlil dan Golkar pun fo-

kus bekerja. Tak memilikirkan soal citra. Bahlil berusaha secara optimal untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Kalau sukses, pasti Pak Prabowo akan dicintai rakyat Indonesia. Kalau dicintai rakyat, maka tidak ada kemungkinan lain selain Pak Prabowo akan kita dukung menjadi calon presiden kembali," ujar Sarmuji.

Meski demikian, terkait konfigurasi Pilpres mendatang, Sarmuji mengatakan Golkar belum membahas lebih jauh soal skema pasangan yang akan diusung.

Ketua Media dan Penggalangan Opini DPP (MPO) Partai Golkar Nurul Arifin mendukung keputusan Bahlil. Dia yakin, Bahlil telah memperhitungkan keputusan tersebut.

"Pak Bahlil pastinya punya perhitungan sendiri. Kami sebagai kader pastinya mendukung keputusan Ketua

Umum," ujar Anggota Komisi I DPR itu, Kamis malam (12/2/2026).

Mengenai sikap Golkar yang akan mendukung Prabowo lagi, Nurul menilai, hal itu merupakan bentuk konsistensi dan fatsu partai yang selama ini selalu berada di lingkaran kekuasaan. Opsi koalisi pun tetap menjadi pilihan rasional.

"Dalam perjalanan pascareformasi, belum ada partai tunggal yang memenangkan pertarungan. Karena tetap butuh partai lain untuk memenuhi Presidential Threshold," tandas Nurul.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, sebenarnya peluang Golkar mengusung cawapres di 2029 cukup besar. Namun, keputusan Bahlil tidak maju sebagai cawapres patut diapresiasi.

Agung menyebut, posisi Golkar masih sangat kuat, baik di tingkat nasional maupun daerah. "Partai Golkar memiliki

infrastruktur politik yang mapan dan terbukti dengan raihan juara ke-2 di Pileg 2024 dan di pilkada memiliki menang di 60 persen daerah," ujar Agung, Kamis malam (12/2/2026).

Ia menjelaskan, capaian tersebut menunjukkan mesin politik Golkar tetap solid dan teruji dalam berbagai kontestasi elektoral. Dengan kekuatan kursi yang signifikan di parlemen serta dominasi di banyak daerah, Golkar memiliki daya tawar tinggi dalam menentukan arah koalisi ke depan.

Menurut Agung, jika Bahlil mampu menunjukkan kinerja terbaik dan selaras dengan kemauan publik, sebenarnya bisa saja diusung menjadi cawapres. "Jika konsolidasi partai berjalan seiring dengan performa pemerintahan yang positif, peluang Golkar kembali menempatkan kadernya di posisi strategis nasional akan semakin terbuka," tandasnya. ■ BYU

Prabowo Hadir Di Rapat Perdana BoP Di Washington

Sikap Indonesia

... DARI HALAMAN 1

memegang dokumen penandatanganan piagam keanggotaan Israel.

Netanyahu kemudian mengumumkan secara resmi melalui media sosial X. "Saya menandatangani akses Israel sebagai anggota Board of Peace," tulis Netanyahu, seperti dikutip *Reuters*, Kamis (12/2/2026).

Langkah Israel itu memantik respons beragam. Dua sekutu dekat Amerika Serikat, Polandia dan Italia, justru memilih tidak bergabung dalam organisasi bentuk Trump tersebut.

Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menjelaskan keputusan itu diambil berdasarkan kepentingan nasional. "Dalam keadaan ini Polandia tidak akan bergabung dengan pekerjaan Dewan Perdamaian, tetapi kami akan menganalisisnya," kata Tusk dalam pertemuan pemerintah, Rabu (11/2/2026), dikutip *AFP*.

Meski demikian, Tusk memastikan

hubungan diplomatik negaranya dengan Amerika tetap menjadi prioritas. Ia juga membuka kemungkinan sikap Polandia berubah jika situasi berkembang.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menegaskan negaranya tak dapat bergabung karena kendala konstitusional. "Kami tak bisa bergabung dengan Dewan Perdamaian karena ada hambatan konstitusional yang tak bisa diatasi di pihak Italia," ujarnya, dikutip *Sky TG24*, Kamis (12/2/2026).

Walau absen dari keanggotaan, Italia menyatakan tetap siap membantu pemulihan infrastruktur Gaza. Selain itu, Italia juga mendukung perdamaian jangka panjang di Timur Tengah.

Bagaimana dengan Indonesia? Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menegaskan, keanggotaan negara mana pun di BoP tidak akan menggeser prinsip Indonesia. Kata dia, Indonesia konsisten menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil di Gaza.

"Indonesia juga mengecam pelanggaran hukum internasional termasuk

hukum humaniter, serta mendorong realisasi solusi dua negara," tegas Yvonne.

Indonesia juga memandang keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian. Dalam konteks itu, RI akan memanfaatkan keanggotaannya di BoP untuk memastikan keterlibatan Otoritas Palestina tetap menjadi prioritas.

"Indonesia akan aktif memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina," kata Yvonne.

Presiden Hadir Di Rapat BoP

Yvonne memastikan Presiden Prabowo akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana BoP di Washington DC pada 19 Februari mendatang. Kehadiran Presiden disebut bukan sekadar simbolik, melainkan bagian dari strategi diplomasi aktif Indonesia.

"Indonesia akan menggunakan Board of Peace untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta

mengupayakan perdamaian yang adil berdasarkan *Two-State Solution*," tegasnya.

Selain Prabowo, sejumlah pemimpin dunia telah mengonfirmasi kehadiran. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menyatakan akan menghadiri pertemuan tersebut.

"Dua minggu lagi kita akan bertemu di Washington, karena Dewan Perdamaian akan mengadakan pertemuan perdana," ujar Orban.

Dia menilai, kehadiran Pakistan menggarisbawahi komitmennya terhadap upaya internasional mengatasi krisis kemanusiaan dan stabilitas jangka panjang di kawasan tersebut," demikian dilaporkan *Times of Islamabad*.

Sementara itu, Netanyahu juga diperkirakan menghadiri KTT BoP. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait kehadirannya.

Indonesia menegaskan, apa pun dinamika dan konfigurasi forum internasional yang terbentuk, komitmen terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi garis tetap politik luar negeri RI. ■ UMM

Gerbang Nusantara

Ratu Rachmatuzakiah Bupati Serang Dorong Potensi Ekonomi Desa



mendorong model pengelolaan BUMDes di Desa Cibojong direplikasi di desa-desa lain, yang tersebar di 29 kecamatan di Kabupaten Serang. Dia berharap, keberhasilan BUMDes itu bisa menginspirasi desa-desa lain, mengembangkan potensi ekonomi berbasis inovasi, kolaborasi, dan gotong royong.

"Meski di sore hari, saya tetap semangat untuk hadir. Ini bentuk dukungan saya kepada warga desa. Saya ingin menyampaikan, jangan malu jadi orang desa, karena saya juga berasal dari desa," imbuhnya.

Politisi PAN itu mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Serang, untuk menggalang dan mengembangkan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Dengan begitu, harap dia, desa mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Semangat terus untuk berkarya, menemukan inovasi, dan menggali potensi desa. Dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Semoga desa-desa di Kabupaten Serang bisa mendapatkan hasil yang lebih baik," tegasnya.

Jika seluruh potensi desa bisa dikelola dan dikembangkan dengan baik, lanjut dia, hal itu akan menjadi sumber pendapatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Seperti yang disampaikan Direktur BUMDes Cibojong, warga bisa bergotong royong membangun BUMDes. Kalau semangat gotong royongnya bagus, saya yakin desa-desa di Kabupaten Serang akan semakin sejahtera," cetusnya. ■ KAL

BUPATI Serang, Ratu Rachmatuzakiah meresmikan Green House sekaligus panen selada hidroponik di Desa Bumi Lestari Sejahtera, di Desa Cibojong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (12/2/2026). Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya mendorong penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal dan inovasi pertanian.

Dalam kesempatan itu, Ratu Zakiyah, sapaan Ratu Rachmatuzakiah, menetapkan BUMDes Bumi Lestari Sejahtera sebagai pilot project, atau percontohan bagi desa-desa lain di Kabupaten Serang. Dia mengapresiasi inisiatif dan kerja keras pengurus BUMDes Cibojong, yang berhasil menggerakkan partisipasi masyarakat.

"Secara pribadi dan atas nama Pemerintah Daerah, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BUMDes Bumi Lestari Sejahtera. Saudara-saudara telah menggerakkan masyarakat untuk mengembangkan BUMDes berbasis tanaman hidroponik," ujarnya.

Lebih lanjut, Ratu Zakiyah



SIDAK JELANG RAMADAN: Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri (tengah) melakukan inspeksi mendadak (sidak) barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) di pasar modern, di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (12/2/2026). Pemerintah Kota Samarinda bersama TNI dan Polri melakukan sidak bapokting meliputi beras, cabe, minyak goreng, telur, ikan hingga elpiji 3 kilogram guna memantau harga serta stoknya untuk mengantisipasi lonjakan harga dan kelangkaan bahan pangan jelang bulan Ramadan 1447 Hijriah.

ANTARA FOTOM RISYAL HIDAYAT/BAK

Bupati Sumedang Mundur Dari PPP

Gerindra Dapat Amunisi Baru

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, resmi mengundurkan diri dari PPP. Keputusannya bergabung dengan Partai Gerindra bertujuan untuk memperluas ruang gerak dan strategi pembangunan Kabupaten Sumedang, serta memperkuat koneksi dengan Pemerintah Pusat.

PENGUNDURAN diri Dony disampaikan di hadapan jajaran pengurus dan kader PPP Kabupaten Sumedang di Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Sumedang, di Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Kamis (11/2/2026).

Dalam kesempatan itu, dia berpamitan dengan pengurus DPC PPP Kabupaten Sumedang serta jajaran Pimpinan Anak Cabang (PAC), atau pengurus tingkat kecamatan se-Kabupaten Sumedang. Suasana haru tercermin dari ratusan kader Partai Kabah, yang melepas 'kepergian' Dony.

Dalam keterangannya kepada awak media, Dony menegaskan, keputusan meninggalkan PPP bukan keputusan mendadak. Menurutnya, proses pengambilan keputusan berlangsung

cukup lama dan melalui pertimbangan yang matang.

"Saya sudah melakukan pertemuan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) hingga DPC. Kemarin, saya sudah sampaikan kepada pengurus kabupaten, hari ini kepada pengurus kecamatan. Saya memohon doa, ridho, dan maaf, atas keputusan ini," ujar.

Dony mengungkapkan, satu setengah tahun terakhir dirinya melakukan perenungan, sebelum menentukan arah politik yang saat ini dipilih. Dia menyadari, keputusan tersebut berpotensi menimbulkan kekecewaan di kalangan kader dan pengurus PPP.

"Mungkin ada yang kecewa. Itu wajar, dan saya terima dengan lapang dada. Saya mohon maaf jika keputusan ini mengecewa-

kan," imbuhnya.

Soal keindahannya ke Partai Gerindra, Dony memastikan, dirinya tak mendapat tekanan atau intervensi politik dari pihak manapun. Dia menegaskan, keputusan itu diambil secara sadar, bertanggung jawab, serta dilandasi pertimbangan moral dan kemaslahatan masyarakat.

Menurut Dony, keputusannya bergabung dengan Gerindra bertujuan untuk memperluas ruang gerak dan strategi pembangunan Kabupaten Sumedang, serta memperkuat koneksi dengan Pemerintah Pusat. Dengan begitu, harap dia, seluruh program pembangunan daerah bisa berjalan lebih optimal.

"Ke depan, pembangunan Sumedang perlu strategi yang lebih luas dan sinergi yang lebih kuat. Kita perlu menghubungkan program daerah dengan program nasional, seperti ketahanan pangan, bantuan-bantuan, serta kebutuhan dasar masyarakat," terangnya.

Dony menambahkan, orientasi utama dari keputusan politik itu, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun keluarga.

Dia menegaskan, keputusan itu didasari oleh semangat dan kepentingan besar, yakni kemaslahatan seluruh masyarakat Sumedang.

"Pengunduran diri dari PPP, tidak akan memengaruhi komitmen saya sebagai Bupati Sumedang. Saya akan tetap fokus menjalankan tugas-tugas pemerintahan hingga akhir masa jabatan. Saya akan menuntaskan amanah masyarakat, dengan hasil terbaik," tandasnya.

Sementara, Ketua DPC PPP Kabupaten Sumedang, Ilmawan Muhammad mengatakan, kehadiran Dony ke sekretariat partai merupakan silaturahmi sekaligus pamitan resmi kepada jajaran pengurus dan kader partai.

"Sebagai keluarga besar, tentunya kami merasa berat. Tapi, setelah penjelasan beliau, kami bisa memahami. Keputusan ini sudah dipertimbangkan sebaik-baiknya," ujarnya.

Ilmawan juga mengakui adanya rasa kecewa di kalangan kader. Namun, dia menilai, langkah Dony didasari niat baik untuk kemajuan Kabupaten Sumedang, dan pihaknya menghormati

keputusan tersebut.

"Ini menjadi tantangan bagi kami untuk melahirkan kader-kader terbaik lain, seperti Pak Dony. Kami tetap solid dan melanjutkan perjuangan partai," cetusnya.

Terpisah, Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Sumedang, Warson Mawardi mengatakan, pihaknya menyambut positif rencana bergabungnya Dony Ahmad Munir. Menurutnya, Gerindra terbuka bagi siapa pun yang ingin berkontribusi pada membangun daerah.

"Mudah-mudahan ini menjadi tenaga dan kekuatan baru, serta mendapat respons positif dari masyarakat," ucapnya.

Funisionaris DPW PPP Jabar, Zaini menegaskan, kepindahan Dony tak berkaitan dengan dinamika internal yang terjadi di tubuh DPW PPP Jabar. Dia menegaskan, DPW PPP Jabar juga tidak menghalangi keputusan Dony.

"Dony itu pengurus PPP pusat, bukan Jabar. Hubungan juga baik-baik saja. Ini hak beliau, dan kami menghormati pilihan tersebut," ucapnya. ■ KAL

Incar Suara Anak Muda

PKB DIY Bentuk Pengurus Di Bawah Usia 25 Tahun

DEWAN Pengurus Wilayah (DPW) PKB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkenalkan jajaran pengurus baru, dalam acara Satu Meja Bareng Media di Yogyakarta, Rabu (11/2/2026). Silaturahmi itu dilakukan di tengah peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026.

Ketua DPW PKB DIY, Umaruddin Masdar mengatakan, struktur kepengurusan baru PKB DIY diisi oleh banyak kalangan muda dan perempuan. Menurut dia, komposisi tersebut merupakan bagian dari persiapan dan strategi PKB dalam menyongsong Pemilu Legislatif (Pileg) 2029.

"Kami memperkenalkan jajaran pengurus baru, agar bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan teman-teman media di DIY. Silaturahmi ini bertepatan dengan Hari Pers Nasional," ujarnya di Yogyakarta, Rabu (11/2/2026).

Umaruddin menjelaskan, komposisi kepengurusan saat ini didominasi oleh perempuan dan generasi muda. Menurut dia, keputusan itu merupakan bagian dari upaya PKB, untuk mempertahankan basis kultur sekaligus membuka ruang lebih luas bagi anak muda dan perempuan.

"Pengurus kami 53 persen adalah perempuan dan generasi muda. Kami juga membuka wilayah baru anak muda dan perempuan," ucap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY itu.

Umaruddin memaparkan, peta pemilih pada Pemilu 2029 akan didominasi generasi Z, generasi X, serta generasi Alpha yang mulai memiliki hak pilih. Karenanya, PKB DIY ingin lebih dekat dan mendengar langsung aspirasi mereka.

"Pemilu 2029 nanti pemilih mayoritasnya Gen Z, Gen X dan Alpha yang mulai bisa mendapatkan hak pilih. Kami

ingin kebersamai mereka, mendengarkan aspirasi mereka. Kami yakin, PKB bisa mewujudkan demokrasi yang baik ke depan," imbuhnya.

Umaruddin menambahkan, DPW PKB DIY telah melakukan penataan sistem internal, dan optimistis meningkatkan capaian ke depan. Dari sisi kaderisasi, lanjutnya, PKB DIY masuk kategori terbaik secara nasional bersama DPW PKB Lampung.

"Kaderisasi Jogja dan Lampung, terbaik secara nasional. Ke depan, tinggal bagaimana kami meningkatkan. Kami ingin menang secara elektoral, dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat," tegasnya.

Sebagai melakukan regenerasi, sambung dia, DPW PKB DIY juga membentuk pengurus harian yang berusia 25 tahun ke bawah. Menurutnya, para kader muda itu akan mengikuti proses kaderisasi, agar semangat dan perspektif anak muda terus mewarnai arah kebijakan partai.

"Kami membentuk pengurus harian dengan usia 25 tahun ke bawah, agar nafas anak muda bisa terus terwujud. Kami juga terus mempererat hubungan dengan Nahdlatul Ulama (NU), sebagai garis basis kultural," tandasnya.

Sementara, Sekretaris DPW PKB DIY, Aslikh Rina Ulyaddin menyatakan, partainya akan terus bergerak dan bersinergi, dalam membangun generasi muda. Menurutnya, digitalisasi menjadi hal penting untuk dilakukan, karena era teknologi informasi yang bergerak cepat.

"Kami akan bergerak, bersinergi untuk membangun anak-anak muda. Kami berharap bisa kebersamai anak muda dan membangun generasi yang kritis, serta melek terhadap perkembangan teknologi yang semakin dinamis," ujarnya. ■ OSP



KECAM PENEMBAKAN: Ketua Ikatan Pilot Indonesia (IPI), Capten Muammar Reza (Tengah) didampingi Dewan Kehormatan IPI, Capten Rama Noya (kiri), Anggota IPI, FO Meisa Anggiarti (kanan), Direktur Teknis General Aviation IPI, Capten Willy Resoebon (Kedua kanan) dan Wakil Ketua IPI, Capten Fauzi Irwan (Kedua Kiri) bersama Anggota Ikatan Pilot Indonesia memberikan keterangan terkait insiden tewasnya pilot Smart Air yang ditembak di Boven Digoel di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (12/2/2026). IPI mengancam dan mengutuk keras penembakan terhadap pilot dan kopilot pesawat Smart Air, Captain Egon Erawan dan Captain Baskoro Adi Anggoro di Bandara Koroway Batu, Boven Digoel, Papua Selatan yang menyebabkan keduanya meninggal dunia.

PUTU WAHYU RAMA/RAKYAT MERDEKA/IRM.ID

Perkuat Basis Suara

PAN Sulsel Intensifkan Program Bantu Rakyat

DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), melakukan *roadshow* ke sejumlah daerah, untuk mengintensifkan konsolidasi. Kunjungan tersebut difokuskan pada penguatan struktur, dan penyatuan langkah kader.

Ketua DPW PAN Sulsel, Husniah Talenrang menegaskan, pihaknya mengintensifkan konsolidasi untuk penguatan posisi PAN di Provinsi Sulsel. Menurutnya, DPW PAN Sulsel telah melakukan *roadshow* ke sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sulsel, di antaranya Kabupaten Barru, Kota Parepare, dan Kabupaten Pinrang.

"Tugas saya, membesarkan partai dan memastikan PAN menjadi salah satu partai terbesar di Sulawesi Selatan. Ukurannya jelas, kepala daerah kita harus bertambah, bupati dan wali kota harus meningkat. Anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan

kota juga harus meningkat," ujarnya di Parepare, Sulsel, Rabu (11/2/2026).

Lebih lanjut, Husniah mengingatkan tentang pentingnya dukungan sayap partai dan simpatisan, termasuk peran Sun Squad Institute (SSI) sebagai mitra gerakan PAN dalam menjalankan program "Bantu Rakyat".

"PAN tidak mungkin bekerja sendiri. Kita tidak bisa bergerak tanpa sayap partai dan tanpa simpatisan. Di sinilah SSI hadir. Mudah-mudahan, kita bisa berjalan bersama sehingga kursi PAN semakin bertambah," harap Bupati Gowa itu.

Menurut Husniah, konsolidasi yang dilakukan pihaknya, merupakan kelanjutan dari rangkaian silaturahmi politik yang sebelumnya dilakukan di wilayah selatan Provinsi Sulsel, seperti Jeneponto, Bantaeng, dan Bulukumba, guna memetakan kekuatan dan potensi peningkatan suara partai.

"Kalau di wilayah selatan sudah kita laksanakan, kewajiban DPW adalah menuntaskannya juga di Ajatappareng, Parepare, wilayah utara, Luwu Raya, dan seluruh wilayah lainnya. Ini tugas bersama," imbuhnya.

Husniah menambahkan, SSI telah terbentuk di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulsel, dan mulai menjalankan berbagai program sosial, termasuk bedah rumah layak huni, serta program "Toko Harapan" yang menyediakan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin dan pelaku UMKM.

"Program ini sangat diminati. Utamanya, oleh anak-anak muda. Sebab itu, saya membentuk SSI. Energi anak muda harus kita prioritaskan untuk mempercepat gerakan partai," cetusnya.

Husniah juga menginstruksikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Parepare, untuk merapikan struktur hingga tingkat Dewan Pimpinan Cabang

(DPC), atau pengurus tingkat kecamatan, dan Dewan Pimpinan Ranting (DPR), atau pengurus tingkat kelurahan dan desa, serta menjalankan instruksi Ketua Umum melalui konsep "satu relawan, satu TPS".

"Mulai dari sekarang! Tidak ada kata terlambat. Justru, kita yang akan tertinggal kalau tidak menjalankan perintah ketua umum. Sampaikan kepada masyarakat, PAN hari ini adalah PAN yang siap bekerja untuk rakyat, siap bergerak, dan siap menang," tandasnya.

Ketua DPD PAN Parepare, Hermanto Pasenangi menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPW PAN Sulsel, yang menyempatkan hadir di tengah padatnya agenda menuju Pinrang.

"Kami mendapat kabar, Ibu Ketua DPW memiliki agenda ke Pinrang, tapi menyempatkan diri untuk singgah dan 'pulang kampung' ke Parepare. Ini menjadi

kehormatan dan kebahagiaan bagi kami semua," ujarnya.

Hermanto menerangkan, kepengurusan baru PAN Parepare tengah disusun, dengan komposisi sebanyak 80 persen wajah baru. Tujuannya, menghadirkan energi segar bagi partai.

"Kami berupaya mencari figur-figur yang benar-benar memiliki komitmen untuk membesarkan partai. Saya turun langsung untuk mencari tokoh-tokoh potensial, yang dapat dipersiapkan sebagai calon legislatif pada periode mendatang," jelas Wakil Wali Kota Parepare itu.

Hermanto optimis, PAN Parepare tetap kompetitif di tengah dinamika politik yang semakin ketat. "Dengan semangat dan kerja keras seluruh pengurus, PAN di Kota Parepare akan semakin kuat. *Insyaa Allah* pada pemilihan berikutnya, PAN dapat meraih kursi lebih banyak," pungkasnya. ■ OSP

Bagian Dari Koalisi Pemerintah PPP Dukung Prabowo Maju Lagi Di Pilpres 2029



Muhammad Mardiono

PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menambah daftar partai politik (parpol) yang mendukung Prabowo Subianto maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2029. Dukungan ini diberikan PPP karena menjadi bagian dari partai pendukung Pemerintah.

"Kalau saya sendiri tentu mendukung," kata Ketua Umum (Ketum) PPP, Muhammad Mardiono pada acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP di Hotel Claro, Makassar, Rabu (11/2/2026) malam.

Mardiono menjelaskan, selain PPP merupakan bagian dari koalisi Pemerintah, dirinya juga saat ini menjabat sebagai Utusan Presiden Bidang Ketahanan Pangan. Selama satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kata dia, berbagai program berjalan baik, terutama di sektor ketahanan pangan.

"Sejujurnya, selama satu tahun ini, program ketahanan pangan sudah kita wujudkan. Kita akan melangkah pada program ketahanan energi dan lain sebagainya," katanya.

Menurut Mardiono, kebijakan ekonomi Pemerintah telah mengedepankan rakyat dan mengembalikan kesejahteraan ekonomi untuk rakyat. Di antaranya, program Makan Bergizi Gratis (MBCG) dan Koperasi Merah Putih.

Edukasi Untuk Anak Muda Bawaslu Gandeng Gen-Z Jaga Integritas Pemilu 2029

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berupaya menjadikan Pemilu 2029 lebih baik lagi dari pesta demokrasi sebelumnya. Kali ini, dengan resep melibatkan generasi Z alias Gen-Z sebagai mayoritas calon pemilih, untuk lebih berperan di Pemilu akan datang.

"Fungsi pencegahan pelanggaran Pemilu harus diperkuat melalui edukasi kepada anak muda," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagia di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Bagia mengatakan, salah satu upaya melibatkan anak muda di pesta demokrasi mendatang adalah dengan menerima audiensi dari anak muda itu sendiri. Bawaslu telah menerima kunjungan Perkumpulan Warga Muda di Kantor Bawaslu, Selasa (10/2/2026).

Kepada kelompok anak muda, Bagia menekankan pentingnya penguatan literasi politik dan kesadaran demokrasi di kalangan Gen Z. Dia mengatakan, pengawasan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi aspek krusial dalam menjaga kualitas Pemilu.

"Di 2024, berkat kerja sama dan peningkatan kapasitas staf, polarisasi di media sosial tidak separah sebelumnya. Ke depan, fokus kita tetap di sana karena yang paling banyak terparap adalah generasi muda," katanya.

Bagia menambahkan, pesatnya perkembangan media sosial, menuntut penguatan pendidikan politik untuk menekan penyebaran hoaks dan disinformasi. Dia menilai, dibandingkan Pemilu 2019, pengelolaan isu di media sosial pada Pemilu 2024 menunjukkan kemajuan.

"Pemilih muda tidak datang ke TPS tanpa bekal pengetahuan. Mereka harus memahami latar belakang partai (partai politik) maupun calon yang akan dipilih," tandasnya.

Senada, Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, Yusti Erlina mengatakan, perlu pendekatan khusus yang disesuaikan dengan karakter Gen Z. Tantangannya, kata dia, adalah merancang materi pendidikan politik yang relevan dan efektif

ayat dan untuk rakyat," tegasnya. Sebagai utusan Presiden Prabowo di sektor pangan, Mardiono menilai Pemerintah sangat tegas soal kebijakan pangan nasional. Dia meyakini, Indonesia ke depan akan keluar dari ketergantungan impor.

"Bangsa besar harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri," ujarnya. Kebijakan ketahanan pangan, kata Mardiono, tidak hanya menekan impor, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan stabilitas harga. Dia memastikan, PPP melalui fraksinya di DPRD Kabupaten-Kota terus mengawal kebijakan Pemerintah.

"PPP tidak sekadar menjadi partai koalisi, tetapi kekuatan politik yang aktif mengawal agenda kesejahteraan nasional," tandasnya.

Menurut Mardiono, tantangan politik ke depan semakin berat. Dia memperkirakan, Pemilu 2029 akan didominasi pemilih dari kalangan milenial dan Generasi Z yang membawa perubahan cara pandang dan pendekatan dalam pelaksanaan pemilu.

"Setiap zaman memiliki tantangannya masing-masing," ujarnya.

Mardiono menegaskan, PPP harus mempersiapkan diri menjadi bagian dalam mengantarkan generasi muda agar kelak mampu memimpin bangsa dan bersaing dengan negara lain. PPP, kata dia, akan berjuang untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.

"Itulah tugas kader PPP," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah partai politik telah menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto melanjutkan kepemimpinan dua periode. Di antaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Gerindra. ■ BSH



SILATURAHMI IMLEK: Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron (kedua kiri) mendampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Yudhoyono (tengah) saat menghadiri kegiatan silaturahmi sekaligus melaksanakan bakti sosial dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2577 di Vihara Hok Tek Bio, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (11/2/2026). Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Partai Demokrat dalam mempererat tali persaudaraan serta memperkuat semangat kebersamaan dan toleransi antarumat beragama di tengah masyarakat.

FOTO : PARTAI DEMOKRAT

Ikhtiar Membangun Bangsa

Gerindra Dorong Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya

Partai Gerindra mendukung pembangunan ekonomi kreatif berbasis budaya sebagai ikhtiar membangun bangsa. Kampung-kampung ekonomi di daerah perlu didorong untuk terus tumbuh, berkembang dan maju.

WAKIL Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mendukung pembangunan ekonomi kreatif berbasis budaya sebagai ikhtiar membangun bangsa. Dia mendorong kampung-kampung ekonomi di daerah untuk terus tumbuh, berkembang dan maju.

"Kami sangat senang melihat ada kampung-kampung ekonomi kreatif seperti Kampung Batik Okra ini di Surabaya," kata Saras ketika mengunjungi Kampung Batik Okra di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (12/2/2026).

Saras menjelaskan, Kampung Batik Okra merupakan contoh konkret pengembangan ekonomi kreatif yang lahir dari kreativitas dan keterlibatan langsung warga, baik sebagai pengggagas maupun pelaku usaha.

"Kalau kita mau membangun ekonomi dari bawah, inilah salah satu contohnya," kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik

Komisi VII DPR ini.

Ketua Umum Pengurus Pusat (Ketum-PP) Tunas Indonesia Raya (Tidar) ini menegaskan, penguatan ekonomi kreatif tidak bisa dipisahkan dari upaya pelestarian budaya. Keberadaan kampung batik, kata dia, sangat strategis untuk memastikan generasi muda tetap mengenal dan menghargai kekayaan budaya Indonesia.

"Pelestarian budaya ini penting untuk memastikan generasi muda dan generasi penerus tidak melupakan kekayaan budaya kita," tuturnya.

Namun, Saras mengakui masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku usaha di Kampung Batik Okra, terutama dalam aspek pemasaran dan pengelolaan usaha. Dia meminta Kementerian Ekonomi Kreatif memberikan perhatian serius terhadap dua aspek tersebut.

"Dua hal ini yang menjadi perhatian, yakni pembinaan pengem-



Rahayu Saraswati

bangun usaha dan penguatan strategi pemasaran," tegasnya.

Saras juga mengapresiasi keunikan batik Kampung Okra yang bersifat custom dengan motif yang tidak ditemukan di daerah lain. Keunikan tersebut, kata dia, membuat produk memiliki nilai jual lebih tinggi. Bahkan, untuk satu kain batik, proses pembuatannya bisa memakan waktu hingga satu tahun.

"Harapan kami, Kementerian Ekonomi Kreatif bisa membawa produk ini ke expo-expo luar negeri, termasuk bersinergi dengan

Kementerian Pariwisata agar ada daya tarik wisata," jelasnya.

Selain dukungan pemasaran, Sara mendorong penguatan pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi pelaku ekonomi kreatif. Melalui skema tersebut, kata dia, pelaku ekonomi kreatif bisa memperoleh pembiayaan antara Rp 100 juta hingga Rp 500 juta, sesuai hasil evaluasi tim penilai.

"Harapannya, ini bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh intelektual property (IP) besar, tetapi juga oleh IP lokal seperti di Kampung Batik Okra ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar mengkau tengah membangun ekonomi kreatif berbasis budaya daerah. Terkini, dengan mempersiapkan Jogja Festival Forum & Expo (JFFE) 2026 pada 15-16 April 2026.

Irene mengatakan, Pemerintahan akan bantu mengkontribusi JFFE 2026 sebagai festival yang tidak hanya menjadi ruang perayaan budaya, melainkan juga pusat pertumbuhan ekonomi kreatif dengan dorongan

kolaborasi antar pejuang ekraf, pariwisata, digital, hingga merchandising yang memberi dampak ekonomi semakin luas.

"Yogya is full expo sudah dikenal banyak orang harus naik kelas," ungkap Wamen Ekraf Irene, di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Dalam pertemuan itu, Wamen Ekraf Irene juga menyampaikan peluang kolaborasi lintas sektor di Indonesia. Nantinya, kata dia, tema Festival as Cultural & Economic Infrastructure akan menekankan kolaborasi dan diplomasi antar penyelenggara festival.

Irene menambahkan, dalam suatu festival juga perlu menghadirkan seluruh pemangku kepentingan dalam satu ekosistem. Sehingga, kata dia, persoalan maupun peluang dapat dibahas bersama dan berawal dari situlah kolaborasi serta model bisnis baru bisa terbentuk.

"Tugas Kementerian Ekraf lima tahun pertama adalah setting up the foundations dan membuka lebar-lebarnya kesempatan untuk menaikkan kapabilitas dari komunitas-komunitas kreatif yang ada," katanya. ■ BSH

Trending Topics

Diluncurkan Kemendikdasmen

Program Hari Belajar Guru Sudah Tepat, Kurangi Beban Administrasi

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof Abdul Mu'ti menetapkan kebijakan Hari Belajar Guru. Menurut Mu'ti, kebijakan ini akan membuat guru memiliki hari khusus untuk meningkatkan kompetensi.

"Pada satu hari itu, guru hanya belajar dan tidak mengajar," katanya usai membuka Konsolidasi Nasional Kemendikdasmen 2026 di Bogor, Jawa Barat, Senin (9/2/2026).

Mu'ti berharap, program tersebut dapat membantu para guru mengoptimalkan potensi, kualitas dan profesionalisme guru sebagai tenaga pendidik. Selain itu, kata dia, Kemendikdasmen juga akan menghidupkan kembali sejumlah program pendukung peningkatan mutu guru.

"Seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG), serta berbagai pelatihan lainnya," katanya.

Kemendikdasmen juga, kata Mu'ti, turut menerapkan kebijakan penguatan bimbingan dan konseling. Peningkatan mutu pendidikan, kata dia, harus berjalan seimbang. Antara kualitas pembelajaran, penguatan karakter, dan dukungan kebijakan yang berpihak pada pengembangan guru.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Kurniasih Mufidayati mendukung langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerapkan kebijakan Hari Belajar Guru sebagai bagian dari penguatan kompetensi dan profesionalisme

tenaga pendidik di Indonesia.

"Kami menyambut baik kebijakan Hari Belajar Guru. Guru memang perlu ruang khusus untuk meningkatkan kompetensi dan memperbaharui pengetahuan agar kualitas pembelajaran di kelas semakin baik," ujarnya di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan agar implementasi kebijakan tersebut tidak menambah beban administratif guru yang selama ini sudah cukup tinggi. Salah satu tantangan utama di lapangan adalah banyaknya waktu guru yang tersita untuk urusan administrasi dibandingkan penguatan materi dan metode mengajar.

"Justru ini harus dibarengi dengan penyederhanaan laporan dan tugas-tugas administratif supaya guru bisa benar-benar fokus mengajar dan meningkatkan kapasitas diri," katanya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Wijaya mengungkapkan, persoalan mendasar pendidikan bukan terletak pada dokumen kurikulum, melainkan pada kecakauan tata kelola guru.

"Negara membutuhkan guru berkualitas, tetapi justru gagal menciptakan sistem yang memuliakan, mensejahterakan dan melindungi profesi guru," katanya.

Wijaya mengusulkan pembentukan Badan Khusus Guru sebagai solusi atas kegagalan sistemik yang sudah berlangsung lama. Kata dia, badan ini diperlu-



Prof Abdul Mu'ti

kan karena kebijakan guru terlalu terfragmentasi dan membutuhkan satu komando nasional.

"Data guru tidak terintegrasi antar K/L, membuat perencanaan selalu melenceng dari kebutuhan riil," jelasnya.

Selama ini, kata Wijaya, sudah ada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang memiliki basis data lengkap tentang guru. Mulai dari tempat tugas, kualifikasi akademik, hingga kualifikasi sertifikat pendidik. Namun perlindungan profesi guru nyaris tidak sistematis. Sehingga guru bekerja dalam rasa cemas.

"Belum lagi pengelolaan karier dan distribusi guru tidak adil, terutama bagi honorer dan daerah 3T. Tanpa lembaga khusus setingkat nasional yang kuat, reformasi pendidikan hanya akan berputar-putar di permukaan," ungkapnya.

Wijaya menegaskan, sebanyak apa pun kurikulum diubah, hasil-

nya tidak akan signifikan jika kualitas kelelahan, tidak aman, dan tidak dihargai. Pendidikan adalah kerja manusia, bukan sekadar sistem administrasi. Maka dari itu, guru harus bermartabat, sejahtera dengan adanya pendapatan minimal dan terlindungi.

"Bonus demografi yang sering dibanggakan justru bisa berubah menjadi bencana jika negara gagal memastikan ketersediaan guru yang profesional, sejahtera dan terlindungi. Tanpa guru, ruang kelas hanyalah bangunan kosong; tanpa guru yang bermartabat, sekolah kehilangan ruhnyanya," pungkasnya.

Di media sosial X, warganet mendukung langkah Pemerintah meningkatkan kompetensi para guru demi perbaikan kualitas pendidikan nasional. Namun peningkatan kompetensi perlu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi profesi guru.

Akun @bulunangko menegaskan, kualitas pendidikan nasional akan menentukan nasib bangsa di masa depan. "Kalau mau memperbaiki bangsa ini basisnya harus dari perbaikan pendidikan. APBN kita harus mampu mengubah dunia wajah pendidikan, mulai dari pembangunan infrastruktur pendidikan, menyiapkan dan pembenahan kualitas guru, hingga mensejahterakan para guru dan tenaga kependidikan," katanya.

Akun @momomore11 menilai, jika guru disejahterakan dan ditambah kompetensi maka masalah pendidikan akan lebih mudah teratasi. "Menurutku perbaikan

dulu kualitas para guru dan kesejahteraan mereka, masalah lainnya juga akan segera diselesaikan, mau kurikulum atau pemerataan pendidikan sekalipun," tulisnya.

Akun @alorauluna menyebutkan, upaya peningkatan kompetensi guru merupakan wacana lama yang belum jelas hasilnya. "Dulu Pemerintah bikin Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang awalnya memang dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru, dengan harapan bahwa guru yang kompeten akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Tapi, realitas yang saya lihat PPG kayak gak seindah yang direncanakan," sentilnya.

Akun @analiskg berpendapat, membenahi yang sudah ada lebih baik daripada mewanakan pembangunan sekolah baru dan perekrutan guru baru. "Masa ada pejabat yang memilih untuk bangun sekolah baru, rekrut guru baru yang dibayar tinggi. Padahal, tinggal memperbaiki kualitas sekolah yang ada, bayar gaji guru yang sudah ada dengan layak, dan beri kesempatan guru untuk menambah kompetensi," ujarnya.

Akun @kojectcrypto menimpali, mutu pendidikan di Tanah Air makin tertinggal karena profesi guru kurang dihargai. "Jangan heran kalau kualitas pendidikan di Indonesia mandeg. Gurunya disuruh mendidik generasi masa depan, tapi nggak dihargainya. Bagaimana bisa menuntut peningkatan kualitas pendidikan kalau kesejahteraan guru diabaikan," sindirnya. ■ OSP

Perkuat Transisi Energi Bersih Pertamina Terapkan Pilar Terminal Hijau Di Cilegon

PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Energy Terminal (PET), memulai asesmen delapan pilar *Green Terminal* (Terminal Hijau) di Terminal LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Tanjung Sekong, Cilegon, Banten.

Terminal Hijau merupakan bagian dari inisiatif Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (*Environmental, Social, Governance/ESG*) 2026 untuk memperkuat transisi energi dan pengembangan bisnis rendah karbon.

"Green Terminal bukan hanya proyek, tetapi bagian dari strategi keberlanjutan bisnis yang terintegrasi," tegas Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono dalam seremoni *kick off Green Terminal* di Terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Rabu (11/2/2026).

Kick off menandai dimulainya proses penilaian standar terminal hijau pada fasilitas strategis yang menyuplai sekitar 35-40 persen kebutuhan LPG nasional tersebut.

Ia menjelaskan, asesmen dilakukan terhadap delapan pilar utama yang mencakup aspek operasional, keselamatan, lingkungan, tata kelola, sosial, serta transformasi digital guna memastikan terminal energi tetap andal, kompetitif, dan berkelanjutan.

Menurut Agung, penerapan prinsip ESG menjadi pengungkit dalam menjaga keandalan operasional sekaligus mendukung target pengurangan emisi karbon.

"Pemanfaatan energi terbarukan dilakukan untuk menurunkan jejak karbon operasional terminal," ujarnya.

Berdasarkan data pada paparan acara, PET telah memasang pembangkit listrik tenaga surya (*solar photovoltaic*), yakni panel surya yang mengubah sinar matahari menjadi listrik, di Terminal LPG Tanjung Sekong dengan kapasitas 85,5 kilowatt peak (kWp), serta di Integrated Terminal (IT) Tanjung Uban sebesar 1.700 kWp.

Direktur Utama PET Bayu Prostiyo menambahkan, selain energi surya, PET menjalankan diversifikasi energi melalui peralihan penggunaan generator set atau genset berbahan bakar fosil ke jaringan listrik nasional.

"Kami menyiapkan pengembangan hidrogen hijau yang terintegrasi dengan proyek panas bumi Ulubelu," terang Bayu.

Ia menjelaskan, pengembangan hidrogen hijau tersebut dirancang sebagai proyek percontohan. Yaitu uji coba awal sebelum diterapkan secara lebih luas, sekaligus program percepatan tahap awal dalam transformasi terminal energi rendah karbon.

Pengembangan Green Hydrogen Ulubelu atau hidrogen hijau berbasis energi panas bumi tersebut dilakukan melalui sinergi antar anak usaha Pertamina. Yakni PT Pertamina Geothermal Energy sebagai penyedia hidrogen, PT Elnusa Petrofin sebagai pendukung distribusi, dan PET sebagai pengguna untuk operasional terminal.

Skema tersebut ditargetkan mampu memenuhi hingga sekitar 25 persen kebutuhan listrik operasional Terminal LPG Tanjung Sekong, sekaligus menurunkan emisi tidak langsung (*scope 2 emissions*) dari penggunaan listrik konvensional.

Terminal LPG Tanjung Sekong merupakan fasilitas penyimpanan dan distribusi LPG strategis yang dilengkapi dermaga dengan kapasitas kapal hingga 65.000 *DeadWeight Ton* (DWT), yakni ukuran bobot mati kapal serta tangki penyimpanan propane dan butane masing-masing 44.000 metrik ton.

PET menargetkan proses asesmen dan penyusunan peta jalan (*roadmap*) Terminal Hijau berlangsung sepanjang 2027-2028.

"Ini sebagai bagian dari transformasi menuju perusahaan pengelola terminal energi terintegrasi berkelas dunia," pungkas Bayu. ■ DWI



KICK OFF GREEN TERMINAL: Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono (tengah), Direktur Utama PT Pertamina Energy Terminal Bayu Prostiyo (kanan) dan Direktur Perencanaan Bisnis PT Pertamina International Shipping Eka Suhendra, saat melakukan *kick off Green Terminal* atau Terminal Hijau dengan menyentuh layar secara bersama di Terminal LPG Tanjung Sekong, Kota Cilegon, Banten, Rabu (11/2/2026).

ANTARA FOTO/ANGGA BUDHIYANTORWA

Kinerja Ekonomi Nasional Makin Baik

Pelindo Patok Tahun Ini Arus Petikemas Tumbuh 5 Persen

PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) mematok arus petikemas tahun ini sebanyak 13,77 juta TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit) di seluruh terminalnya atau tumbuh 5 persen dibandingkan capaian 2025.

CORPORATE Secretary Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan, jika target tersebut tercapai, berarti naik hingga 10 persen jika dibandingkan realisasi 2024 yang berada di angka 12,48 juta TEUs.

Ia mengatakan, optimisme target tersebut didorong oleh solidnya kinerja ekonomi nasional dan meningkatnya aktivitas industri di berbagai wilayah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 5,11 persen menjadi salah satu indikator utama.

"Kami optimis melihat geliat industri di berbagai daerah. Pertumbuhan ekonomi nasional menjadi bahan bakar utama bagi kami untuk mencapai target ini," ujar Widyaswendra di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/2/2026).

Widyaswendra membeberkan, sejumlah terminal diproyeksi bakal menjadi motor pertumbuhan arus petikemas. Misalnya di Sulawesi, Terminal Petikemas Kendari terdorong oleh meningkatnya ekspor nikel.

Lalu di Kalimantan Utara, Terminal Petikemas Tarakan bersiap menangkap potensi logistik gas alam cair (LNG/

Liquefied Natural Gas). Sementara di kawasan timur Indonesia, Terminal Petikemas Merauke mencatat kenaikan arus barang seiring masifnya dukungan logistik untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sedangkan untuk Pulau Jawa, Terminal Petikemas Semarang diprediksi semakin sibuk sejalan dengan berkembangnya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Industri Kendal (KIK), yang mendorong aktivitas ekspor-impor sektor manufaktur.

Pihaknya mencatat, arus petikemas luar negeri pada 2025 sebanyak 4,40 juta TEUs, atau meningkat 10,28 persen dibandingkan periode 2024. Jumlah tersebut terdiri dari petikemas impor sebanyak 2,12 juta TEUs, petikemas ekspor 2,25 juta TEUs dan petikemas *transshipment* 30 ribu TEUs.

"Untuk mendukung pencapaian target 2026, sejumlah terminal petikemas yang kami kelola akan dilengkapi dengan alat bongkar muat baru untuk meningkatkan kualitas layanan petikemas bagi para pengguna jasa perusahaan," jelasnya.



FOTO: IG STIKOSAAWS

Widyaswendra

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno memperkirakan, ekspor Indonesia akan tumbuh 7 persen pada 2026.

Ia menilai, salah satu pemacu utama adalah semakin banyaknya perjanjian perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA) yang dijalin dengan negara mitra.

"FTA membuka akses pasar lebih luas dan menurunkan hambatan tarif, sehingga produk ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif," beber Benny.

Dengan kata lain, sambung dia, kebijakan ini tidak hanya mendorong volume ekspor, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah perdag-

angan global.

"Sektor logistik diprediksi akan tumbuh melampaui laju pertumbuhan ekonomi," katanya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya memperkirakan, sektor transportasi dan pergudangan akan tumbuh antara 10-11,6 persen, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 1.700 triliun.

Lonjakan ini, menurut Trismawan, sebagian besar didorong oleh tingginya transaksi perdagangan digital dan *e-commerce*.

Selain itu, proyek ketahanan pangan dan inisiatif Pemerintah lainnya juga diperkirakan mendorong permintaan layanan logistik.

"Beberapa faktor domestik turut memperkuat pertumbuhan logistik, termasuk pesatnya transaksi *e-commerce* melalui media sosial, proyek hilirisasi industri, serta program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih," ungkapnya.

Akademi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) Solo, Lukman Hakim menilai, ekspor Indonesia pada 2026 masih berpeluang tumbuh, terutama dari sektor manufaktur.

"Selama ini ekspor kita ditopang manufaktur seperti sepatu dan tekstil, meski tekstil tidak

sekuat dulu. Dengan melemahnya nilai tukar, produk kita justru menjadi lebih kompetitif di pasar global," terangnya.

Menurut Lukman, tantangan tarif dan biaya masuk di sejumlah negara memang masih ada, namun tidak berlaku untuk semua produk.

Ia menilai, peluang ekspor ke kawasan Timur Tengah dan Afrika masih sangat terbuka, asalkan Pemerintah mampu melakukan pemetaan pasar dengan tepat.

"Pemetaan pasar menjadi kunci untuk menentukan arah tujuan ekspor," katanya.

Selain itu, dukungan terhadap pelaku usaha juga dinilai penting, mulai dari kemudahan perizinan, kebijakan perpajakan, hingga akses pembiayaan.

Ia menambahkan, dari sisi logistik, keberadaan pelabuhan yang mampu disandari kapal berukuran besar akan membuat arus petikemas lebih efisien tanpa harus transit di negara lain.

Dengan penguatan infrastruktur, modernisasi alat, serta dukungan terhadap arus ekspor nasional, Lukman meyakini PT Pelindo Terminal Petikemas tidak sekedar mengelola bongkar muat.

"Perusahaan ini akan mengambil peran strategis sebagai penggerak rantai logistik dan penopang optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan," yakinnya. ■ IMA

Sepanjang 2025 Mandiri Salurkan Program Bansos Senilai 15,1 Triliun

SEPANJANG 2025, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 15,1 triliun kepada lebih dari 7,45 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang tersebar di 123 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia melalui skema Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menegaskan, perseroan terus mengakselerasi ekosistem penyaluran bantuan sosial yang terintegrasi untuk memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran.

Riduan bilang, pihaknya akan terus mendukung implementasi program-program Pemerintah. Khususnya, yang terkait langsung dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat luas.

"Hal tersebut guna memberikan nilai tambah bagi penguatan ekonomi kerakyatan," kata Riduan dalam keterangan resmi, Rabu (11/2/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan di Indonesia terus menunjukkan perbaikan.

Per September 2025, ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur melalui Gini Ratio berada di level 0,363 atau turun 0,012 poin dibandingkan Maret 2025.

Pencapaian tersebut mencerminkan dampak positif kebijakan perlindungan sosial yang dijalankan Pemerintah secara konsisten. Termasuk melalui berbagai program bansos yang ditujukan untuk menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan.

Adapun instrumen utama dalam kebijakan tersebut, antara lain bantuan sosial dalam bentuk Program Sembako dan PKH, yang menasar keluarga prasejahtera secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya, efektivitas kebijakan perlindungan sosial tersebut ditopang peran lembaga keuangan dalam menyediakan sistem penyaluran yang andal, terintegrasi, dan menjangkau masyarakat secara luas.



FOTO: BANK MANDIRI

Riduan

Menurut Riduan, demi memastikan efektivitas penyaluran bantuan sosial sesuai kebijakan Pemerintah, Bank Mandiri secara aktif memperkuat koordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait.

Mulai dari proses pendataan, pemutakhiran data, hingga distribusi kepada keluarga penerima manfaat di berbagai daerah.

Upaya tersebut dilakukan guna mendukung akurasi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial, sekaligus menjaga kredibilitas.

"Serta keberlanjutan program perlindungan sosial yang menjadi prioritas Pemerintah," ujar Riduan.

Selain terlibat aktif dalam penyaluran bansos, emiten berkode saham BMRI ini juga turut aktif mendukung Program Pemerintah, yang ditujukan agar para penerima bansos segera keluar dari daftar penerima.

Pemerintah menargetkan lebih dari 300 ribu orang dapat lepas dari daftar penerima bansos di akhir tahun ini.

Program tersebut mendorong para penerima bansos untuk mulai merintis usaha kecil, sehingga mampu memperoleh penghasilan yang lebih berkelanjutan.

Pada triwulan IV-2025, Bank Mandiri telah melaksanakan sejumlah kegiatan sosialisasi kepada penerima bansos yang telah memulai usaha kecil.

"Antara lain melalui pemberian materi motivasi, pengelolaan keuangan, serta penguatan kemampuan pemasaran," tukas Riduan. ■ DWI

Foto Seremonia



FOTO: DOK OJK

GELAR SURVEI NASIONAL LITERASI & INKLUSI KEUANGAN: Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi (tengah) didampingi Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu (kedua dari kanan), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti (kanan) memberikan keterangan ke masyarakat di acara Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 di Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/2/2026). Survei tersebut dilaksanakan atas kerja sama OJK, LPS dan BPS. Hasil survei akan dijadikan dasar utama pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelita Air Rampungkan Reaktivasi Bandara Pinang

PT Pelita Air Service (PAS), melalui lini bisnis *airport management* telah rampungkan reaktivasi operasional Bandara Pinang Kampai Dumai, Riau.

Direktur Utama Pelita Air Service Dendy Kurniawan menyampaikan, reaktivasi Bandara Pinang Kampai merupakan manifestasi nyata dari komitmen perusahaan dalam memperkuat ekosistem transportasi udara nasional, khususnya melalui sinergi lintas pemangku kepentingan yang solid.

Reaktivasi tersebut mencakup kesiapan infrastruktur, yakni landasan pacu sepanjang 1.800 meter untuk melayani penerbangan reguler dan charter dengan fokus rute domestik.

Menurut Dendy, sinergi yang terjalin dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Dumai, Kementerian Perhubungan, Airnav dan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) menjadi hal esensial dalam proyek reaktivasi Bandara Pinang Kampai.

"Kami dan seluruh pemangku kepentingan berada dalam komitmen yang sama untuk meningkatkan konektivitas udara nasional, khususnya di wilayah Sumatera," ujar Dendy dalam keterangannya,

Kamis (12/2/2026).

Dendy menjelaskan, kolaborasi dengan Pemkot Dumai diarahkan pada keberlanjutan operasional bandara untuk jangka panjang.

"Pemkot Dumai telah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pembukaan rute, seperti Dumai-Padang, Dumai-Pekanbaru, Dumai-Medan, Dumai-Batam, Dumai-Jakarta, dan rute strategis lainnya bagi maskapai-maskapai yang berminat," bebernya.

Selain itu, keberhasilan reaktivasi Bandara Pinang Kampai juga tidak luput dari dukungan Kementerian Perhubungan, yakni melalui Direktorat Bandar Udara dan Direktorat Navigasi Penerbangan, serta AirNav Indonesia sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) penyelenggara layanan navigasi penerbangan.

Dia menjelaskan, Bandara Pinang Kampai dapat beroperasi kembali secara resmi, berlandaskan Sertifikat Bandar Udara dan Sertifikat Pelayanan Navigasi dan Komunikasi Penerbangan yang diterbitkan Kementerian Perhubungan dan Airnav Indonesia, yang selaras dengan Civil Aviation Safety Regulations (CASR). ■ IMA

Harta Karun

Kratom RI Digemari Warga AS, Ekspornya Capai Rp 154 Miliar

INDONESIA menjadi produsen kratom terbesar di dunia. Amerika Serikat (AS) menjadi negara tujuan utama ekspor komoditas yang kerap dijuluki daun surga tersebut. Sebanyak 4.694 ton kratom telah diekspor ke Negeri Paman Sam senilai 9,15 juta dolar AS (Rp 154 miliar). Kratom digemari masyarakat AS karena dipercaya mampu meningkatkan energi, vitalitas dan memperbaiki suasana hati.

Mineral Kritis Kunci Transisi Energi Dan Daya Saing Tambang

PERAN mineral kritis kian menentukan arah industri pertambangan nasional di tengah transisi energi global. Hal itu mengemuka dalam *Workshop Mining for Journalist* yang digelar Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) di Jakarta, Selasa (10/2). Dalam sesi pertama workshop, Anggota Dewan Pakar PERHAPI Prof. Irwandy Arif menegaskan, permintaan mineral kritis akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. "Demand mineral kritis sampai 2030 naik semua. Tapi kalau gonjang-ganjing seperti sekarang, nggak akan ada yang berani investasi. Potensi kita sebenarnya luar biasa. Pemerintah dan industri pertambangan harus memiliki pemikiran yang sama. Kalau tidak, akan sia-sia, kehilangan kesempatan," tandas Irwandy.

menghadapi berbagai tantangan, baik dari dinamika global maupun kebijakan di dalam negeri. Terutama dalam negeri, seiring dengan munculnya beberapa kebijakan baru di sektor pertambangan dan sektor lain yang memberikan dampak kepada sektor pertambangan. Sejumlah kebijakan yang menjadi perhatian, antara lain pengembalian persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dari tiga tahun menjadi satu tahun, pengurangan kuota produksi batubara dan nikel, isu Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, penerapan biodiesel B50 hingga rencana pengambilalihan tambang emas Martabe. Selama ini, PERHAPI bersama asosiasi di lingkup industri pertambangan, baik hulu maupun hilir terus berperan menjadi mitra Pemerintah dalam memberikan masukan-konstruktif untuk kemajuan usaha pertambangan. Wakil Ketua Umum PERHAPI Resvani juga menegaskan, mineral kritis, mineral strategis, serta pengembangan material maju sebagai fondasi pertumbuhan industri menuju Indonesia Emas 2045. Dia menilai, pengembangan industri manufaktur berbasis mineral strategis masih belum optimal akibat rendahnya eksplorasi, keterbatasan hilirisasi, serta ketergantungan impor material maju.

Guru Besar Pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini juga menyoroti kesiapan infrastruktur pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, termasuk pilihan teknologi baterai yang digunakan. "Antam sedang menjalankan proyek ini. Tapi memang kebanyakan kendaraan listrik menggunakan baterai LFP. Di Indonesia rencananya menggunakan NMC (Nikel, Mangan, Cobalt)," terang Irwandy yang juga Komisaris Utama PT Antam Tbk. Workshop Mining for Journalist tahun ini merupakan penyelenggaraan keempat sejak pertama kali digelar pada 2023. Ketua Umum PERHAPI Sudirman Widhy Hartono mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah komunikasi antara insan pertambangan dan wartawan sektor energi. "Selain untuk mempererat silaturahmi antara pengurus PERHAPI dengan rekan-rekan wartawan, juga menjadi ajang tukar menukar informasi, *sharing knowledge* di antara kita terkait isu-isu di sektor pertambangan," ucap Sudirman. Menurut Sudirman, industri pertambangan nasional saat ini

menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia pertambangan melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi insinyur. ■ FAZ



Dok Kemenko Perekonomian

DAPAT OPINI WTP: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) bersama Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Daniel Lumban Tobing, saat acara *Entry Meeting* Pemeriksaan Laporan Keuangan KEMENKO Perekonomian Tahun Anggaran 2025 di Kantor Kemkeno Perekonomian, Kamis (12/02/2026). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kemkeno Perekonomian dengan temuan pemeriksaan yang perlu ditindaklanjuti. Capaian tersebut adalah prestasi selama 17 kali berturut-turut sejak tahun 2008.

Tumbuh 15,71 Persen Di Tengah Kepungan impor

Industri Baja Jadi Tuan Rumah Di Negeri Sendiri

Kabar gembira datang dari industri baja nasional yang tumbuh hingga 15,71 persen di tengah kepeungan produk impor. Lonjakan tersebut menempatkan sektor baja sebagai industri dengan performa tertinggi di sektor manufaktur.

HAL itu didorong oleh kenaikan permintaan domestik yang mencapai 19,7 juta ton, seiring dengan percepatan proyek konstruksi nasional dan program pembangunan tiga juta rumah. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, capaian ini menandakan peran strategis sektor logam sebagai fondasi pembangunan, sekaligus penggerak utama penguatan struktur industri nasional. "Meski begitu, tren positif tersebut dihadapkan pada tekanan eksternal yang semakin kuat, terutama akibat kelebihan pasokan di

pasar global. Kita harus waspada kondisi ini," ujar Airlangga saat memberikan sambutan secara *darling* pada Musyawarah Nasional Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) 2026 di Jakarta, Rabu (11/2/2026). Airlangga menjelaskan, kelebihan pasokan baja global di perkirakan melonjak hingga 2,5 miliar metrik ton pada 2025. Sebagai antisipasi, Pemerintah memperkuat perlindungan industri melalui penerapan 23 Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, serta perpanjangan instrumen Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk

produk seperti *hot rolled coil*, baja paduan dan baja lapis. Selain proteksi pasar, transformasi menuju industri hijau menjadi prioritas. "Mulai 2026, industri baja kita juga harus bertransformasi agar tidak ditinggal pasar internasional," kata Airlangga, merujuk pada pemberlakuan kebijakan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) di pasar global. Ketua Dewan Pengawas IISIA Silmy Karim menilai, tantangan utama saat ini bukan pada kemampuan teknis, melainkan praktik perdagangan global yang tidak seimbang. Dia menyoroti strategi produsen luar negeri yang merugikan industri lokal, seperti manipulasi harga (*under invoicing*), pengalihan kode Harmonisasi Sistem (HS), hingga

insentif pajak di negara asal. "Yang terjadi adalah ketidakseimbangan level *playing field*, sehingga industri baja nasional dirugikan," tutur Silmy. Menurutnya, kebijakan hambatan perdagangan seperti penetapan harga impor minimum merupakan langkah koreksi pasar. "Bukan perlindungan yang membuat kita diminabobokan, tetapi *fairness*," ucapnya. Senada, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menyoroti maraknya baja non-spesifikasi yang beredar di pasar domestik. Produk tersebut sering kali lolos dari kewajiban perpajakan, sehingga merusak struktur harga. Saleh mendorong penguatan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), ter-

utama pada proyek yang menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). "Tanpa keberpihakan Pemerintah, industri yang menjadi *mother industry* ini dengan sendirinya akan tergerus," ucapnya. Di tengah kompleksitas tekanan global, Ketua Umum IISIA Akbar Djohan optimistis peluang bagi industri baja tetap terbuka lebar melalui penguatan hilirisasi dan ekspansi manufaktur. "Hari ini kita berjanji, baja nasional harus berdaulat, mandiri dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri," tegas Akbar. Sektor baja diharapkan menjadi tulang punggung bagi sektor otomotif dan infrastruktur yang diprediksi masih akan terus berekspansi hingga akhir 2026. ■ NOV

Ekonomi Sumatera Pascabencana Ekspor Meningkatkan, Harga Pangan Stabil

PEMERINTAH mempercepat pemulihan ekonomi di daerah terdampak bencana di Sumatera. Aktivitas perdagangan barang-surat pulih. Hal ini tercermin dari stabilnya harga bahan pokok dan kinerja ekspor yang mulai menunjukkan peningkatan. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, Pemerintah terus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perdagangan pascabencana di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Utara (Sumut). Langkah ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan aktivitas perdagangan, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak. Budi mengatakan, perkembangan harga bahan kebutuhan relatif stabil setelah bencana. Indeks Perkembangan Harga pada Januari-Februari 2026 menunjukkan tren penurunan dibandingkan Desember 2025, seiring aktivitas logistik

yang telah kembali normal. Selain itu, kinerja ekspor di wilayah terdampak juga tetap menunjukkan ketahanan. Pascabencana pada akhir November 2025, kinerja ekspor Aceh masih terjaga dengan cukup baik. Nilai ekspor Aceh pada November 2025 tercatat meningkat menjadi 58,28 juta dolar AS (Rp 980,5 miliar) atau tumbuh 20,16 persen secara bulanan dibandingkan Oktober 2025. Kinerja tersebut kembali meningkat pada Desember 2025 menjadi 59,69 juta dolar AS (Rp 1 triliun) atau tumbuh 2,42 persen secara bulanan. "Kondisi ini mengindikasikan, meski bencana alam berdampak pada distribusi dan logistik di sejumlah wilayah, secara *agregat* ekspor Aceh mampu pulih relatif cepat," kata Budi saat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumbar dan Sumut, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).



Budi Santoso

Sementara, Sumbar mencatatkan pertumbuhan ekspor yang kuat sepanjang 2025. Nilai ekspor meningkat dari 2,18 miliar dolar AS (Rp 36,6 triliun) pada 2024 menjadi 2,78 miliar dolar AS (Rp 46,7 triliun) pada 2025, atau tumbuh 27,64 persen secara tahunan.

Budi menjelaskan, dibandingkan pola November-Desember 2024, kinerja ekspor Sumbar pada November-Desember 2025 menunjukkan perbedaan signifikan. Pada November 2024, ekspor turun relatif terbatas sebesar 9,66 persen dan melemah pada Desember 2024 sebesar 21,20 persen. Sebaliknya, pada 2025, penurunan ekspor pada November terjadi lebih dalam sebesar 52,56 persen, sebelum diikuti pemulihan yang sangat kuat pada Desember 2025 sebesar 174,15 persen. "Perbedaan pola ini menegaskan, bencana alam menjadi faktor utama yang memperdalam pelemahan ekspor pada November 2025, meski secara keseluruhan daya pulih ekspor Sumbar tetap terjaga dengan baik," jelasnya. Di Sumut, nilai ekspor meningkat dari 10,66 miliar dolar AS (Rp 179,3 triliun) pada 2024 menjadi 12,56 miliar dolar AS (Rp 211,3 triliun) pada 2025, atau tumbuh

17,84 persen secara tahunan. Kinerja ekspor sempat tertekan pada November 2025 dengan penurunan sebesar 25,98 persen akibat bencana alam yang mengganggu aktivitas logistik dan produksi di sejumlah sentra ekspor. Namun, ekspor kembali pulih pada Desember 2025 dengan pertumbuhan sebesar 18,89 persen. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengapresiasi langkah Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam percepatan pemulihan pascabencana. Dia menyampaikan arahan Presiden agar seluruh kementerian dan lembaga menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga. Hal ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi menjelang Ramadan. Teddy mengatakan, Presiden ingin memastikan ketersediaan dan harga kebutuhan bahan pokok tetap stabil di daerah terdampak bencana menjelang Ramadan. ■ DIR

PENGUMUMAN KEKUA LELANG EKSEKUSI
KEMOR: BUKES/HT2024PN/KTSSEL

Atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan penempatannya No. 81Eks/HT2024PN/KTSSEL tanggal 25 Februari 2025, Saya Denny Purnama, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perintah Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV akan melakukan Pelelangan/Perjualn ditunjuk untuk:

1. Sediaan tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 5154/Cipte/Ura dengan luas 543 m², atas nama IRMA KOSASIH (In Casa - Terhohon Eksekusi II) terletak di Jl. Taman Brawijaya III No. 16 Rt. 004 Rw. 03 Kel. Cipte Ura, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah No. 14 : Jalan Taman Brawijaya III ;
Sebelah Timur : Jalan Taman Brawijaya Rayi ;
Sebelah Selatan : Jalan Taman Brawijaya Rayi ;
Sebelah Barat : Jalan Taman Brawijaya III No. 16 Rt. 004 Rw. 03 Kel. Cipte Ura, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah No. 14 : Jalan Taman Brawijaya III ;
Sebelah Timur : Tanah Kosong ;
Sebelah Selatan : Jalan Taman Brawijaya Rayi ;

Catatan:
1. Batas tanah dan bangunan tersebut merupakan satu kesatuan dari 2 (dua) Sertifikat yaitu, SHM No. 5154/Cipte/Ura dan SHM No. 5155/Cipte/Ura ;
2. Harga Lelang Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar rupiah) ;
3. Uang Jaminan Rp. 7.800.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) ;

Yang selanjutnya telah ditetaskan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. 81Eks/HT2024PN/KTSSEL, masing-masing terdapat 15 Agustus 2024, Pelelangan/Perjualn dimula Lemang tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Juni 01, 27 Februari 2026 ;
Waktu penawaran : Setiap hari yang pada selisih selang s.d. batas akhir penawaran ;
Batas Akhir Penawaran : 27 Februari 2026 09.30 WIB (sesuai waktu Server) ;
Alamat Domain : www.pn.jkt.sala.go.id ;
Tempat Lelang : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus ;
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi pejabat Negeri Jakarta Selatan Telp.021-7805900, atau KPNK, Jakarta IV, Telp.021-3443833 ;

Penetapan Pemesan :
Sifat dan Ketentuan Lelang:
1. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada website lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP/PWNP dan Nomor Rincising atau nama sendiri (uang jaminan dibebaskan ke nomor tersebut jika peserta tidak diijaz sebagai pemenang lelang) ;
2. Peserta lelang wajib memiliki rekening bank yang berstatus penyetoran, korporasi ataupun instansi/lembaga wajib menyetor uang jaminan sebesar tersebut diatas ke nomor Virtual Account (VA) PT BNI (Penero) Uang jaminan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah tertera di nama KPNK, sebelum/belumnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang ;
3. Pelaksanaan lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang melalui ULC, lelang.go.id ;
4. Cara penawaran secara Open Bidding melalui aplikasi lelang.go.id sejak ditayangkan sampai dengan batas akhir penawaran lelang ;
5. Harga penawaran belum termasuk dan uang jaminan diotor ke Kas Negara ;
6. Pemenang lelang harus melunasi kewajibannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi maka pembebasan tanggungan dan uang jaminan akan diserahkan ke Kas Negara ;
7. Objek lelang dengan keterangan dan kondisi apa adanya (as is) ;
8. Objek lelang adalah benda bergerak yang terdapat objek lelang diperlihatkan untuk melihat langsung ke lokasi dan jika perlu dapat menanyakan ke Kantoran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi pejabat Negeri Jakarta Selatan Telp.021-7805900, atau KPNK, Jakarta IV, Telp.021-3443833 ;

Pemohon Eksekusi : PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Para Terhohon Eksekusi : PT. RIZKI ABADI DK

Jakarta, 13 Februari 2026.
Denny Purnama.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Jalan DR. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur

PENGUMUMAN
Nomor : 53/Peng-31.75.100.UP.02/2026

Untuk mendapatkan Sertifikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

No	Nama Pemohon	JENIS DAN NOMOR HAK ATAS TANAH	TERDAFTAR ATAS NAMA	TANGGAL PEMBUKUAN	LETAH TANAH	KETERANGAN
1	ASEP SUNANDAR, Ca	Hak Milik No. 05010/Kalisari, Surat Ukur Tgl. 4 Oktober 2005 No. 00098/2005 Luas : 157 M ² NIB. 09.04.07.01.06508	AYANIH	25-02-2000	Rt.0007/Rw.011, Kelurahnan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur	- Berdasarkan Surat Pengantar tentang Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resor Metropolitan Jakarta Timur Nomor : B/3122/VIII/Res/1.2/2025/R/ tanggal 19 Agustus 2025 dan Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-Surat Nomor : SKTLK/5698/VII/2025/SPKT/ RESTRO JAKTIM/POLDA METRO JAYA tanggal 07 Juli 2025 telah dilaporkan bahwa hilang akibat dimakan rayap Sertipikat Hak Milik No.05010/Kalisari atas nama Ayanih. - Berdasarkan Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 15 Januari 2026. - Nomor Pengumuman Pada Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) : 6/2026.

Jakarta, 28 Januari 2026
An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
Kepala Subbagian Tata Usaha
Ttd.
Konrad Manurung, S.E., M.H.
NIP. 19780414200641003

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Jalan DR. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur

PENGUMUMAN
Nomor : 40/Peng-31.75.100.UP.02/2026

Berkenaan dengan Pemohonan Hak Atas Tanah/Pemohonan Pengakuan Hak Atas Tanah seperti tersebut dibawah ini, terhitung mulai diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari sebelum proses lebih lanjut, dengan ini diumumkan sebagai berikut :

No	NAMA PEMOHON	PETA BIDANG TANAH	LETAH TANAH	KETERANGAN
1	AGNES WIDYA PURNAMA	Tgl. 07-01-2026 No. 953/2025 NIB. 08040806.09598 Luas : 175 M ²	Jalan SD 01 RT.006 RW.001 Kelurahan Pondok Rangan Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	Berdasarkan Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resor Metropolitan Jakarta Timur Nomor : SKTLK/1584/B/II/2025/RESTRO JAKTIM/POLDA METRO JAYA tanggal 19 Februari 2025 telah dilaporkan kehilangan/ kerusakan barang/surat-surat sebagai berikut : - Akta Jual Beli Nomor 2023/2013, atas nama SARPIN, tanah terletak di Jl. SDN 01 RT.006/001 Kel. Pondok Rangan Kec. Cipayung Jakarta Timur, dengan luas tanah 158 M ²

Kepada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap Pemohonan Hak Atas Tanah/Pemohonan Pengakuan Hak Atas Tanah seperti tersebut diatas agar mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jalan DR. Sumarno, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini dimuat dalam surat kabar, dengan membawa bukti surat-surat ASLI. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut telah berakhir dan ternyata tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak lain, maka Pemohonan Hak Atas Tanah / Pemohonan Pengakuan Hak Atas Tanah tersebut akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 22 Januari 2026
An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
Kepala Subbagian Tata Usaha
Ttd.
Konrad Manurung, S.E., M.H.
NIP. 19780414200641003

USAHA ANDA BELUM LAKU

PASANG IKLAN ANDA DISINI!

HOTLINE 021-53699507

Rakyat Merdeka

Curhat Nyok...

Jalan Babek TNI Berlubang Parah

SELAMAT pagi Pak Pramono Anung. Izin, saya ingin menyampaikan keluhan sekaligus harapan dari warga terkait kondisi Jalan Babek TNI, Rorotan, Jakarta Utara.

Tadi pagi saya hampir mengalami kecelakaan, karena kondisi jalan yang berlubang parah dan sangat membahayakan, terutama bagi pengendara sepeda motor seperti saya.

Kejadiannya, saat kondisi lalu lintas mulai padat, kendaraan terpaksa melambat karena banyak pengendara yang berhati-hati menghindari lubang. Namun, pada saat yang sama, ada juga mobil yang tidak sabar dan memaksakan diri untuk mendahului. Akibatnya, saya hampir terjatuh dan nyaris masuk ke lubang besar di tengah jalan. Alhamdulillah, saya masih bisa menjaga keseimbangan.

Selain banyaknya lubang besar, permukaan jalan juga dipenuhi batu dan kerikil lepas. Kondisi ini membuat jalan menjadi licin, terutama saat pengendara harus mengerem mendadak. Sangat rawan terpeleset dan jatuh, apalagi jika hujan.

Kami khawatir, jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan memakan korban jiwa. Sebagai warga, kami mohon dengan sangat, agar kerusakan jalan yang menjadi akses utama warga ini, dapat segera ditindaklanjuti. Perbaikan jalan bukan hanya soal kenyamanan, tapi menyangkut keselamatan banyak orang.

IG: @khairunnisamm

WA Aje...

Mohon Perbaiki Turap Kali Di Kelurahan Halim

KEPADA Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, turap kali di wilayah RT 06/07, Kelurahan Halim, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, hingga saat ini belum juga diperbaiki.

Padahal, area tersebut cukup ramai dilalui warga dan menjadi akses penting berupa jembatan penghubung bagi anak-anak yang berangkat dan pulang sekolah.

Kondisi turap yang rusak, dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan warga, terutama saat hujan atau ketika debit air meningkat.

Kami berharap, segera lakukan pengecekan dan perbaikan, agar tidak menimbulkan risiko kecelakaan.

085887521XXX

Lapor Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, separator busway di Jalan Raya Bekasi, tepatnya di depan Pasar Pulogadung, sudah banyak yang rusak dan tidak layak.

Kerusakan tersebut sering menyebabkan pengendara, khususnya sepeda motor, mengalami kecelakaan, karena harus menghindari secara mendadak.

Selain membahayakan keselamatan, kondisi ini juga mengganggu kelancaran lalu lintas. Mohon agar separator tersebut segera diperbaiki demi kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.

081317046XXX

Assalamualaikum Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Coran di atas terowongan Selapajang arah Kampung Melayu, Teluknaga, terlihat nyaris runtuh dan berpotensi jatuh.

Hal ini tentu sangat membahayakan pengendara yang melintas di bawahnya, terutama pengguna sepeda motor. Warga merasa khawatir jika sewaktu-waktu coran tersebut jatuh dan menimbulkan kecelakaan serius.

Diharapkan, pihak terkait segera melakukan pengecekan, pengamanan, dan perbaikan demi keselamatan bersama.

089932831XXX

Kondisi kali aliran dari Dewi Sartika, *underpass* Margonda hingga melewati area kantor Wali Kota Depok, terlihat sangat kotor, hitam pekat, dan tidak terawat. Sampah serta endapan lumpur menumpuk, menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu lingkungan sekitar.

Mohon Pemkot Depok dapat lebih memperhatikan dan melakukan pembersihan secara rutin, setidaknya dimulai dari titik-titik terdekat yang paling berdampak bagi permukaan warga.

087850265XXX

Pembaca diundang menyampaikan informasi, keluhan dan komentar tentang kepentingan umum ke email: rakyatmerdeka12@gmail.com dan WA ke nomor: 08577041900



MEMBUAT KUE KERANJANG: Pekerja di sebuah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Rabu (11/2/2026), sedang membuat Kue Keranjang merek Hoki. Menjelang Tahun Baru Imlek, UMKM itu meningkatkan produksi menjadi 2.000 buah kue. Namun, diakui mereka, jumlah order kue pada Imlek tahun ini menurun sekitar 20 persen dibandingkan tahun lalu.

FOTO: PATRARIZKI SYAHPUTRA/RAKYAT MERDEKA/RM.ID

Banyak Pengembang Belum Serahkan Fasos-Fasum

DPRD DKI Bakal Bentuk Pansus & Gandeng KPK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelisik penyebab banyak pengembang di Jakarta belum menunaikan kewajibannya menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Hasilnya diharapkan akan memberi manfaat untuk masyarakat sekaligus penataan aturan.

POLITISI Kebon Sirih membentuk Pansus guna memperkuat pengawasan terhadap penyerahan fasos dan fasum.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan, fasos dan fasum harus memberikan manfaat nyata bagi warga sekitarnya. Baik untuk ruang terbuka hijau, rumah ibadah, maupun sarana olahraga.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menilai, pembentukan Pansus diperlukan karena masih ada pengembang yang belum menuntaskan kewajiban penyerahan fasos dan fasum hingga lebih dari 10 tahun. "Kondisi itu jelas tidak baik dan tidak nyaman bagi warga," kata Inggard, Kamis (5/2/2026).

DPRD akan menekan para pengembang agar menyerahkan fasos dan fasum sebelum memperoleh izin pengembangan di lokasi lain. "Pengembang tidak boleh diberikan izin pengembangan di lahan lain, sebelum kewajibannya dipenuhi," tegas Inggard.

Pansus akan mengecek secara keseluruhan. Mulai dari dokumen hingga status aset. Termasuk membuka ruang koordinasi dengan aparat penegak hukum, bila terdapat pelanggaran.

"Kami akan mengecek status fasos-fasumnya. Jika masih bermasalah, kami akan berkoordinasi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," tegasnya. Pemprov DKI Jakarta baru

saja menandatangani 26 Berita Acara Serah Terima (BAST) pemenuhan kewajiban fasos dan fasum senilai Rp 1,36 triliun dari para pengembang pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), dan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) Semester II Tahun 2025.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi para pengembang yang telah memenuhi kewajibannya kepada Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, penyerahan fasos dan fasum merupakan bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah.

"Saya yakin, ketika para pengembang menyerahkan fasos dan fasumnya, tentu mereka ingin aset tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kepentingan masyarakat," kata Pram saat penandatanganan di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (4/2/2026).

Pram menyebut, kunci utama dalam pengelolaan fasos dan fasum adalah membangun kepercayaan antara Pemerintah dan pengembang.

Karena itu, Pemprov DKI berkomitmen memastikan seluruh aset yang telah diserahkan, tidak hanya tercatat secara administratif, tapi juga benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

"Tidak ada artinya aset diterima, lalu disimpan tanpa dimanfaatkan. Saya meminta



Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Komplek Perumahan DKI, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, merupakan salah satu fasos-fasum di Jakarta.

agar fasos-fasum yang sudah diserahkan, segera digunakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat. Transparansi menjadi kata kunci," ujarnya.

Jika ada pengembang yang belum memenuhi kewajibannya, lanjut dia, Pemprov DKI akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan. Untuk itu, Pram meminta Inspektur DKI Jakarta aktif mengingatkan melalui surat peringatan, dan apabila diperlukan, melakukan penindakan.

"Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Ini merupakan bagian dari proses yang telah disepakati bersama," tegasnya.

Dalam upaya menjaga transparansi, Pemprov DKI melibatkan aparat penegak hukum,

termasuk KPK, serta berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta. Pelibatan ini dilakukan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan dan menghindari potensi penyimpangan.

Inspektur Provinsi DKI Dhany Sukma, dalam laporannya menyampaikan, berdasarkan laporan keuangan teraudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024, total kewajiban fasos-fasum para pengembang kepada Pemprov DKI mencapai 26,92 juta meter persegi.

Hingga saat ini, seluas 18,24 juta meter persegi telah diserahkan. Sementara sisanya, sebesar 8,67 juta meter persegi, atau 32,23 persen, masih belum dipenuhi.

Pada periode Semester II Tahun 2025, Pemprov DKI berhasil menagih kewajiban fa-

sos-fasum sebanyak 26 BAST, dengan nilai Rp 1,36 triliun.

Penyerahan tersebut terdiri atas lahan seluas 100.592 meter persegi, senilai Rp 1,29 triliun, konstruksi seluas 22.181,54 meter persegi, senilai Rp 42,8 miliar, serta konversi Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S) senilai Rp 30,69 miliar.

Diungkap Dhany, sejak 2023 hingga 2025, total kewajiban fasos-fasum yang telah diserahkan kepada Pemprov DKI mencapai 213 BAST, dengan nilai keseluruhan Rp 42,537 triliun.

"Dengan penandatanganan BAST ini, aset fasos-fasum akan langsung diserahkan dari para wali kota kepada BPAD (Badan Pengelolaan Aset Daerah), sehingga dapat tercatat sebagai aset resmi Pemerintah Provinsi DKI," jelasnya. ■ DRs

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
Jl. Harsono RM No. 1 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telp: 021-78839770 / 021-78840013 - Fax: 021-78839743
Website: www.pajakartaselatan.go.id - Email: gajakarta.selatan@yahoo.com

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN
Nomor: 23/Pdt.Ek/2024/PA.JS

Berdasarkan Penetapan Lelang Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 23/Pdt.Ek/2024/PA.JS tanggal 6 Agustus 2025, Pengadilan Agama Jakarta Selatan akan melaksanakan Lelang Eksekusi dengan penananaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV, terhadap objek lelang sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan dengan ukuran tanah seluas 105m² (seratus lima meter persegi) atas nama pemegang hak Anyambira Rizki Mahendra terletak di Jalan Kelurahan Kavling Firdaus Nomor 5, RT001, RW004 (Berdasarkan Sertifikat Hak Milik terletak di Jalan Puskesmas Darul Nazah RT. 001 RW. 004), Kelurahan Ujung, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5603 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
-Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah Komplek H. Rohim;
-Sebelah Timur berbatasan dengan ibu Retno;
-Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kavling Firdaus;
-Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah ibu Dewi;

Nilai Limit	Jaminan Lelang Penawaran Lelang
Rp. 1.110.500.000,00	Rp. 222.100.000,00

Jadwal Pelaksanaan Lelang:

- Hari: Jumat
- Tanggal: 27 Februari 2026
- Waktu penawaran: Sejak layang pada aplikasi Lelang s.d. batas akhir penawaran
- Batas Akhir penawaran: 27 Februari 2026 pukul 10.30 WIB (sesuai waktu server)
- Alamat Domain: lelang.go.id
- Tempat Lelang: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.10 Jakarta

Penetapan Lelang

Syarat-syarat lelang:

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis atau kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang (e-Auction) dengan cara penawaran terbuka (openingbid) yang diakses pada alamat domain lelang.go.id. Adapun syarat, ketentuan, dan tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut.
- Peserta lelang diwajibkan menyertakan jaminan penawaran lelang yang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang. Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA harus sama dengan nominal jaminan yang disetorkan secara sekaligus (tidak dicicil).
- Uang jaminan penawaran lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Jakarta IV selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah Bea Lelang Pembeli sebesar 2% (dua persen) dari harga lelang serta pajak atau tunggakan yang wajib dilunasi oleh Pembeli menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelunasan harga lelang serta bea lelang pembeli wajib dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang dan jika tidak melunasi maka Pembeli akan dinyatakan Wanprestasi dan Uang Jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke Kas Negara;
- Pelunasan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada;
- Objek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is). Peserta lelang dapat melihat kondisi objek lelang melalui aplikasi lelang dan/atau datang ke lokasi lelang untuk melihat kondisi objek lelang yang telah diteliti olehnya. Dalam hal terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat dan sudah diberikan kesempatan untuk melihat barang yang di lelang, maka Pembeli tidak berhak untuk menyangkal atau menarik diri kembali dan melepaskan segala hak tuntutan kerugian atas sesuatu apapun juga.
- Batwa asli dokumen kepemilikan atas objek lelang tidak dikuasai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan selaku Penjual maupun Pemohon Eksekusi;
- Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan/penundaan lelang maka peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Jakarta IV maupun Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Agama Jakarta Selatan di Jalan Harsono R.M No. 1, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Nomor telepon: (021) 78840013. Pemohon Eksekusi Lelang: Miftahul Jannah binti Krisna Indon, S.ST
- Terminon Eksekusi Lelang: Anyambira Rizki Mahendra bin Sumardi

Jakarta, 13 Februari 2026
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Ttd
Didin Jamaludin, S.H., M.H

PENGUMUMAN TENDER PEMILIHAN MITRA ULANG KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II BRANTA, PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: PL.103/16/KSPBranta.Ulg/DJPL/2026

Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Branta, Provinsi Jawa Timur

Peruntukan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara

Deskripsi Objek Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara

Facilities Pelabuhan dengan total nilai wajar BMM sebesar Rp276.535.532.000,- pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Branta, Provinsi Jawa Timur.

Peruntukan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara

Dalam rangka pembangunan dan pengembangan fasilitas infrastruktur pelabuhan serta pengoperasian pelabuhan guna meningkatkan pelayanan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Branta.

Jadwal Pengambilan Dokumen Pemilihan Mitra Ulang

Pendaftaran Calon mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik memberikan informasi untuk ikut serta dalam proses pemilihan mitra melalui link berikut: <https://bit.ly/pemilihanulangmitrasprbranta>

E-Mail: pemilihanmitrasprbranta@gmail.com

Jadwal Pengambilan Dokumen Pemilihan Mitra Ulang

Sejak tanggal 28 Januari 2026 jam 09.00 WIB s.d. 09 Maret 2026 jam 15.00 WIB.

Jadwal dan Lokasi Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran

Pemasukan dokumen pada tanggal 10 Februari 2026 jam 09.00 WIB s.d. 10 Maret 2026 jam 13.00 WIB, dan untuk Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I pada tanggal 10 Maret 2026, serta untuk Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II pada tanggal 21 Maret 2026, yang bertempat di Bagian Keuangan, Gedung Karya Lantai 19, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat.

Uraian Singkat Pekerjaan

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Branta dengan melaksanakan pembangunan dan pengembangan fasilitas infrastruktur pelabuhan serta pengoperasian pelabuhan.

Perkiraan Nilai Investasi

- Nilai Investasi Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara paling sedikit sebesar Rp30.500.000.000,-;
- Kontribusi Tetap tahun pertama minimal Rp239.294.876,- dengan kenaikan minimal sebesar 4% per tahun sesuai dengan estimasi tingkat inflasi;
- Pembagian Keuntungan minimal sebesar 2% dari pendapatan per tahun. Pendapatan tersebut didasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- Jangka Waktu Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

Persyaratan Pemilihan Mitra

BUMI, BUMD dan/atau Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang memiliki Perizinan Usaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Badan Usaha Pelabuhan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Jakarta, 13 Februari 2026
Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara
Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Branta,
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
Ttd Ketua

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jl. Mekar No. 10, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koj, Jakarta Utara
Telp: (021) 22482954, email: kot-jakut@atn.go.id

PENGUMUMAN
Nomor: No.09/Peng-31.72.300/HF.02.02/11/2026

Untuk mendapatkan Sertifikat Baru sebagai Pengganti Sertifikat Hilang, berdasarkan Ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

No	Nama Pemohon	Jenis dan Tanah Nomor Atas Tanah	Terdaftar atas nama	Tanggal Penerbitan	Letak Tanah	Keterangan
1	Maryono	Hak Milik No. 5134/Sunter Jaya	Maryono	08 Desember 2003	Jl. Benteng Mas III 28 Rt. 12 Rw. 06	Berdasarkan Surat Pengantar tentang laporan kehilangan Sertifikat Hak Milik No.5134/Sunter Jaya atas nama Maryono dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara No.87264/VI/RES.124/2023/Reskrim tanggal 25 Juli 2023, telah dilaporkan hilang. - Sertifikat Hak Milik No. 5134/Sunter Jaya atas nama Maryono, terletak di Jl. Benteng Mas III 28 Rt. 12 Rw.06 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan luas tanah 112 M ² .

Jakarta, 11 Februari 2026
a.n. Kepala Kantor Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Utara
Koordinator Kelompok Substansi
Pendaftaran Tanah dan Ruang
Tanah dan Hubungan Kelembagaan
S.td.
Novita Lailya, S.Kom, M.M.
NIP. 19841110 200903 2 004

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.
Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap pemohonan penggantian-penggantian sertifikat tersebut diatas, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.



Crazy World



Sepasang kekasih menikah di stadion Super Bowl, California, Amerika Serikat (AS), Minggu (8/2/2026).

Pasangan Menikah Di Acara Super Bowl

SEPASANG kekasih menikah di atas panggung pertunjukan paruh waktu *Super Bowl* di California, Amerika Serikat (AS), Minggu (8/2/2026). Pernikahan mereka berlangsung di hadapan sekitar 70 ribu penonton yang memadati stadion. Momen tak biasa itu terjadi saat penyanyi asal Puerto Riko Bad Bunny tampil dalam pertunjukan spektakuler dengan menampilkan budaya Latin. Awalnya, pasangan tersebut diketahui mengundang Bad Bunny untuk menghadiri pernikahan mereka. Namun, alih-alih datang sebagai tamu, sang penyanyi justru mengundang keduanya untuk menjadi bagian dari pertunjukan. Suasana semakin meriah ketika Lady Gaga muncul di atas panggung dan menari bersama Bad Bunny membawakan lagu "Baile Inolvidable". Adegan tersebut dibuat menyerupai

resepsi pernikahan, lengkap dengan kue pengantin dan dekorasi pesta. Baju pengantin wanita dirancang oleh perancang Hayley Paige. Dia baru mengetahui menjelang acara bahwa gaunnya akan dikenakan dalam momen bersejarah tersebut. Paige mengatakan, peristiwa itu momen nyata yang penuh kebahagiaan bagi sang pengantin. "Ini bukan hanya penampilan panggung. Ini momen bagi seorang perempuan merasakan kebahagiaan dan mengatakannya kepada orang yang dicintainya," ujar Paige, dilansir *The New York Times*. Bagi sebagian penonton, pertandingan mungkin menjadi sorotan utama malam itu. Namun bagi pasangan tersebut, *Super Bowl* tahun ini merupakan momen tak terlupakan. ■ LDU

"Ini bukan hanya penampilan panggung. Ini momen bagi seorang perempuan merasakan kebahagiaan dan mengatakannya kepada orang yang dicintainya."

Hayley Paige
Perancang

HELLO AMBASSADOR

Duta Besar Arab Saudi Untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi

Serahkan 100 Ton Kurma Dari Raja Salman

DUTA Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi melakukan serah terima simbolis 100 ton kurma untuk rakyat Indonesia. Ini merupakan tradisi tahunan Kerajaan Arab Saudi sebelum memasuki bulan Ramadan. Acara serah terima ini dilakukan di kantor Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar di Jakarta, Rabu (11/2/2026). "Sesuai arahan Raja Salman bin Abdul Aziz, kami menyerahkan kurma kepada sahabat kami di Indonesia," tulis Dubes Faisal dikutip dari akun X Kedutaan Besar Arab Saudi, Kamis (12/2/2026). Hibah kurma yang rutin dilakukan Pemerintah Arab Saudi ini adalah bukti kuatnya persahabatan yang terjalin antara Arab Saudi dan Indonesia. "Hubungan ini juga menekankan betapa dalamnya hubungan yang terjalin antara kedua pemerintahan, Arab Saudi dan Indonesia," tegasnya. Secara khusus, Dubes Faisal mengharapkan kurma ini turut

disalurkan kepada para korban bencana alam yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Pihak Pemerintah Negeri Petro Dolar pun menyerahkan proses distribusi kepada Kementerian Agama. "Semoga Kerajaan Arab Saudi dan juga Indonesia diberikan keselamatan. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa," tutup Dubes Faisal. Menag Nasaruddin Umar berterima kasih atas hibah kurma kualitas premium ini. Menurutnya, kurma dari Arab Saudi merupakan kurma spesial di hati umat Muslim Indonesia. "Banyak jenis kurma yang berada di Indonesia, tapi kurma yang paling membuat senang rakyat Indonesia adalah kurma yang dipetik atau tumbuh dari Arab Saudi. Khususnya, yang melalui kerajaan Saudi Arabia," puji Nasaruddin. Dia mengungkapkan, 100 ton kurma ini akan disalurkan kepada berbagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam, masjid, perguruan tinggi Islam serta panti asuhan. ■ DAY



Dubes Faisal bin Abdullah Al-Amudi (kanan) menyerahkan hibah kurma dari Raja Salman kepada Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Kalah Dari Uruguay Dan Barbados

Indeks Korupsi Amerika Ambruk Ke Titik Rendah

Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Amerika Serikat (AS) anjlok ke posisi terburuk sepanjang sejarah. Dalam laporan terbaru Transparency International, Negeri Paman Sam turun satu peringkat ke posisi ke-29 dari 182 negara.

MENGUTIP *CMN*, Rabu (11/2/2026), skor IPK AS kini berada di angka 64 dalam skala 0-100. Angka 100 berarti sangat bersih dan 0 sangat korup. AS kini sejajar dengan Bahama, serta berada di bawah Lithuania (28), Barbados (24) dan Uruguay (17). Sementara, Indonesia berada jauh di peringkat ke-109 dengan skor 34. Transparency International mencatat, tren penurunan peringkat AS telah berlangsung selama satu dekade terakhir. Kemerosotan kembali terjadi setelah Pemerintahan Presiden Donald Trump dinilai melemahkan kemampuan Pemerintah Federal dalam memerangi korupsi publik. Trump juga dinilai melemahkan sejumlah institusi dan menggunakan instrumen Pemerintahan terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan politiknya. "Kami sangat prihatin dengan situasi di Amerika Serikat. Tren

penurunan ini berpotensi berlanjut," ujar Chief Executive Officer (CEO) Transparency International Maira Martini. Tak hanya di AS, memburuknya korupsi juga terjadi di sejumlah negara demokrasi lain. Inggris, misalnya, mencatat skor terendah sepanjang sejarah di angka 70, meski tetap bertahan di posisi ke-20. Transparency International Inggris menilai, akar persoalan korupsi belum ditangani serius, termasuk pengaruh donor besar dalam politik dan kontroversi sejumlah penunjukan pejabat publik. "Kami tidak menangani akar penyebab korupsi dalam politik kami," ujar CEO Transparency International Inggris Daniel Bruce, dalam sebuah video yang diunggah di *platform X*. Secara global, rata-rata skor IPK turun ke angka 42—terendah dalam lebih dari satu dekade



Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

dan menjadi penurunan pertama dalam kurun waktu tersebut. Transparency International menyebut, mayoritas negara di dunia masih gagal mengendalikan korupsi secara efektif.

Denmark kembali menempati posisi teratas untuk kedelapan kalinya berturut-turut dengan skor 89. Finlandia dan Singapura menyusul sebagai negara dengan sektor publik paling bersih.

Singapura masih unggul di peringkat pertama di Asia Tenggara dengan peringkat global di posisi ke-3. Sementara, Malaysia berada di posisi 54, Timor Leste ke-73 dan Vietnam ke-81. ■ DAY

Leader's Chit Chat



Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong @LawrenceWongST
Singapura tidak memiliki gunung atau saju. Namun kami memiliki Faiz Basha yang mewakili Singapura di Olimpiade Musim Dingin! Perjalanan Faiz mengingatkan kita bahwa dengan ketekunan dan tekad, bahkan mimpi yang paling mustahil pun dapat menjadi kenyataan. Semoga sukses, Faiz.



Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum @Claudiashein
Sebagian besar penduduk telah mendapat vaksin campak. Kementerian Kesehatan merekomendasikan agar: anak-anak berusia 6 bulan hingga 12 tahun yang belum divaksinasi, dan anak-anak berusia 1 hingga 12 tahun yang baru menerima satu dosis enam bulan atau lebih yang lalu, segera mengunjungi fasilitas medis.



Kanselir Jerman Friedrich Merz @Bundeskanzler
Pagi ini kami menerima kabar buruk dari Kanada. Banyaknya korban jiwa akibat penembakan di sebuah sekolah telah membuat kami sangat sedih. Doa kami bersama warga Tumbler Ridge yang sedang berduka atas kehilangan teman dan keluarga mereka. Saya berharap para korban luka segera pulih.



Presiden El Salvador Nayib Bukele @nayibbukele
Keamanan yang kita nikmati sekarang akan dinikmati seluruh warga El Salvador. Kami telah memberantas masalah geng yang telah menghancurkan generasi terdahulu. Proyek #DuaSekolahSehari, mengirim perlengkapan sekolah, komputer, dan menyiapkan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini yang baru. Syukur kepada Tuhan karena telah memberi kami kebijaksanaan dan memungkinkan kita untuk mengalami keajaiban ini menjadi kenyataan hari ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI BEKASI
Jalan Pangeran Jayakarta RT.04 RW.03, Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143,
www.pn-bekasikota.go.id Email: info@pn-bekasikota.go.id

SURAT PANGGILAN SIDANG

Nomor 61/Pdt.G/2026/PN Bks

Pada hari ini, JUM'AT, tanggal 13 FEBRUARI 2026, Saya :

RATNA T.TJANDRA

Jurusita pada Pengadilan Negeri Bekasi atas Perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dan ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk menjalankan pekerjaan ini.

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA :

DRS.H. ABDUL KARIM, MM, Komplek Departemen Koperasi dan PPK No B.26, Kecamatan Cimanggis Depok, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamat keberadaannya di wilayah NKRI;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

Supaya datang menghadap dalam persidangan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi, di Jl. Pangeran Jayakarta, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143, nanti pada hari :

Hari : SELASA, TANGGAL 17 MARET 2026, JAM 09.00 WIB ;

Perlu nya hadir untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor : 61/Pdt.G/2026/PN.Bks, dalam perkara antara :

DJATI PRATISTO Sebagai **Penggugat ;**

Melawan

DRS.H. ABDUL KARIM, MM, Dkk Sebagai Para Tergugat ;

Demikian pekerjaan ini saya jalankan melalui surat Kabar Harian rakyat Merdeka yang terbit di Ibukota Jakarta dan sekitarnya dan kepada Khlayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

JURUSITA
PENGADILAN NEGERI BEKASI
TTD
RATNA T.TJANDRA
NIP.197102031992032003

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR I**
Jl. Tegar Beriman - Cibinong Bogor

PENGUMUMAN

NOMOR : 243/Peng.KP/2025
(TENTANG SERTIPIKAT HILANG)

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

No	a. PEMOHON b. ALAMAT	Hak Atas Tanah Jenis dan Nomor Hak	NIB	Tercatat Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Letak Jalan/Blok Desa/Kel c. Kecamatan	KETERANGAN
1	a. H. SUGANDI b. Jl. Cikert Cikoneg No.12 RT.003/006 Kel. Padasuka Kec. Cimas Kabupaten Bogor	HM No. 2445/Padasuka SU No. 26/Padasuka/2008 Luas 352 m ²	10.10.07 34.04166	H. SUGANDI	24-03-2008	a. - b. Padasuka c. Cimas	- Surat Tanda Penerima Laporan Kehilangan/Barang-Barang/Surat Penitng dari Palres Bogor Nopol : SKTLK/3875/IX/2025/SPKT/POLRES BOGOR/POLDA JAWA BARAT Tanggal 23-09-2025 - Surat Pernyataan dibawah Sumpah/Jani Tanggal 27-11-2025 dibacakan dihadapan Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat-sertipikat tersebut di atas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku menurut hukum dan Sertipikat yang dinyatakan hilang TIDAK BERLAKU LAGI.

HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN MELALUI TELEPON YANG MENGATASNAMAKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR I, BILA ANDA MENGALAMINYA DAPAT MENGHUBUNGI KAMI DI NOMOR 081110680000

Bogor, 28 - 11 - 2025
An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BOGOR I
KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK
DAN PENDAFTARAN
TTD
ZIMAMUN N'AM AULAWI, S.H.
NIP.19871202 201101 1 003

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
Jalan Petiris Kemerdekaan, Kavling 5, Kota Tangerang 15117,
Telp. (021) 5623272 Email: Kot-Tangerang@artpn.go.id

PENGUMUMAN

TENTANG SERTIPIKAT HILANG
Nomor : 9 / PHP / BPN. KOTA / II / 2026

Untuk mendapatkan Sertipikat yang baru sebagai pengganti Sertipikat yang Hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan ini diumumkan bahwa :

No	Nama / Alamat Pemohon	1. Jenis dan Nomor Hak 2. G/S/SU Nomor/Tahun 3. Luas (M ²)	NIB	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Letak Tanah a. Jalan b. Kelurahan c. Kecamatan	KETERANGAN
1	SUSILOWATI Taman Asri H. VI/6 RT/RW. 003/012 Kel. Gaga Kec. Larangan Provinsi Banten	1. HM: 95 2. SU: 53/Gaga/ 1999 3. Luas 110 M ²	00117	Nyonya Doktoranda Hajjah SUSILOWATI	13-11-2006	a. Komp. Taman Asri Blok.H.3 b. Gaga c. Larangan	1. Pernyataan dibawah Sumpah/ Jani tanggal 06/02/2026 2. Surat Keterangan Hilang S. Ke/84/X/RES.1.24./2025/Reskrim Tanggal 06/10/2025

Tangerang, 10 Februari 2026
An. Kepala Kantor Pertanahan
Kota Tangerang
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
Ttd
Joko Satrianto Wibowo, SH., M.H.
NIP. 1990515 201801 1 001

USAHA ANDA
BELUM
LAKU

PASANG
IKLAN
ANDA
DISINI!

HOTLINE
021-53699507

Rakyat Merdeka

Aktor peraih Oscar ini punya ritual khusus saat mengalami tekanan mental dan kebosanan selama syuting film. "Saya berteriak seperti orang gila setiap hari. Ada sekitar 30 orang yang mendengar dan berlari ke ruang rias untuk menjadi bagian dari itu dan ikut berteriak juga," ungkap aktor *The Bride* itu.



CHRISTIAN BALE

FOTO: GETTY IMAGES

Gigi Hadid Disebut Di File Jeffrey Epstein

ISI file kasus kejahatan seksual Jeffrey Epstein menjadi perhatian sejak awal tahun. Dokumen itu mengungkap banyak nama tokoh dan figur publik. Yang terbaru, ada nama model Gigi dan Bella Hadid. Nama kakak beradik itu disebut dalam sebuah email tahun 2015. Sebuah nama yang disensor

bertanya bagaimana Gigi dan Bella bisa begitu cepat meraih ketenaran dalam karier modeling.

Kemudian seseorang yang diyakini sebagai Epstein, menyebut Hadid bersaudari sebagai wajah baru. Namun, sejauh ini tidak ada bukti bahwa kedua saudari tersebut bertemu, berbicara, atau didekati oleh Epstein. ■ MER



FOTO: INSTAGRAM/@GIGIHADID

Dahyun Twice Patah Tulang, Absen Tur Ke Amerika Utara

KABAR kurang menyenangkan datang dari salah satu Dahyun, *member girl-band* asal Korea Selatan, TWICE. Agensi sang idol JYP Entertainment mengumumkan, Dahyun tidak bisa berpartisipasi dalam rangkaian tur Amerika Utara bertajuk *THIS IS FOR* yang dijadwalkan berlangsung mulai 13 Februari hingga 7 Maret mendatang.

"Pada persiapan tur ke Amerika Utara, Dahyun merasa tidak nyaman di bagian lutut dan menerima perawatan ketika berada di Amerika Serikat. Setelah kembali ke Korea, dia menjalani pemeriksaan dan didiagnosa," bunyi pernyataan agensi JYP Entertainment, Rabu

(11/2/2026).

"Berdasarkan saran dari pihak medis, dia diminta untuk menjalani pemeriksaan berikutnya dan mengambil masa istirahat," sambungnya.

Sementara itu, melalui saluran *Buble Live*, Dahyun sendiri meminta maaf karena batal tampil. Dia berharap bisa cepat pulih.

Dahyun menjelaskan, awalnya mengira hanya keseleo ligamen saja. Tapi setelah diperiksa, ternyata patah tulang. Dia pun mengaku sangat kaget bahkan menangis di rumah sakit hari itu.

"Aku sudah mengepak koper untuk 25 hari karena besok seharusnya berangkat ke luar negeri. Aku sedih harus menutup lagi. Akan makan makanan yang baik untuk tulang, supaya bisa bertemu ONCE lagi. New York dan Washington, aku benar-benar ingin bertemu kalian. Maaf," tuntasnya.

■ TAR



FOTO: INSTAGRAM/@DAHYYUNNEE

Olla Ramlan Pacar Tidak Peduli Usianya Lebih Tua

Olla Ramlan menyadari wanita memiliki pacar brondong masih mendapat stigma jelek di Indonesia. Namun, janda tersebut bersyukur sang pacar Tristan Molina, tidak peduli dengan usianya yang lebih tua.

USAI Olla kini 45 tahun. Sedangkan Tristan baru 20 tahun. Di tengah budaya yang kerap memaklumi pria lebih tua dengan pasangan jauh lebih muda, hubungan Olla dengan Tristan justru memantik reaksi beragam. Banyak yang memuji keberanian Olla, tapi tidak sedikit yang mencibirnya.

"Selama ini berhubungan dengan laki-laki selalu bermasalah dengan status janda anak tiga," ujar Olla blak-blakan.

Empat tahun menjanda setelah bercerai dari Aufar Hutapea, Olla mengaku beberapa kali menjalin hubungan. Namun semuanya kandas karena status janda tiga anak.

"Mungkin di Indonesia tidak semudah itu menerima janda. Apalagi aku lebih tua," tambahnya.

Menurut Olla, ketika pria lebih tua memiliki pasangan dengan wanita muda sering dianggap wajar. Tapi, jika perempuan lebih tua memiliki pacar lebih muda, justru dipertanyakan.

Di tengah komentar miring, Olla merasa Tristan hadir sebagai jawaban atas doanya.

"Tiba-tiba Allah kasih Tristan yang pekerja keras, bule, dan dia nggak peduli umur aku berapa. Orangtuanya juga nggak peduli masalah itu," tegas Olla.

Bagi Olla, keluarga Tristan tak memperlakukan usianya merupakan poin penting. Sebab, salah satu isu terbesar dalam hubungan beda usia adalah restu keluarga.

Kemesraan pasangan ini kembali menjadi sorotan saat tampil di stasiun televisi, Olla mengaku menyimpan kontak Tristan dengan nama "Suamiku".

Sementara Tristan menyimpan nomor Olla dengan nama *Girlfriend* dan simbol hati. Olla bahkan sempat protes karena sebelumnya Tristan menuliskan "Istri".

Momen itu memancing tawa, tapi juga mempertegas betapa terbukanya mereka

menunjukkan hubungan. Namun, tak sedikit netizen yang menuding hubungan ini sekadar *gimmick* atau *setting-an* demi popularitas.

Tristan langsung membantah tegas. "Fake? No!" Bahkan ia tak ragu mengatakan, "I love you, sayangku," di depan publik.

Apakah hubungan ini akan bertahan lama? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, Olla Ramlan sedang menantang stigma. Dan kali ini, ia tak lagi peduli pada angka usia, atau omongan orang. ■ MER



Tiba-tiba Allah kasih Tristan yang pekerja keras, bule, dan dia nggak peduli umur aku berapa. Orangtuanya juga nggak peduli masalah itu.



Olla Ramlan



FOTO: INSTAGRAM/@OLLARAMLAN

Zee Asadel Dalam Peran, Latihan Bela Diri

EKS member JKT48, Zee Asadel bakal melakoni film laga berjudul *Jangan Seperti Bapak*. Di debutnya ini, dia berperan sebagai *Angel*, anak ketua gangster yang hidupnya berubah drastis setelah kematian tragis sang ayah.

"Iya, perdana banget (*fighting*). Dan untuk adegan profesional di sini semua sudah dipersiapkan secara matang," ujarnya.

Untuk mendalami perannya itu, Zee mengaku sampai harus latihan ilmu bela diri. Malahan, sang artis menyebut adegan laga justru lebih mending ketimbang harus mendalami emosi untuk menghadirkan karakternya.

"Kalau menurut aku lebih berat di emosi. Koreografi kan masih bisa dihafal. Tapi emosi dan *scene* berat itu mencakup perasaan pribadi, malah jadi lebih berat," tuntasnya. ■ TAR



FOTO: INSTAGRAM/@ZEEASADEL

SELEB TWITT

SEA-BLING BERSATU LAWAN RASISME WARGANET KORSEL

Tagar #SEA puncaki trending topic di platform X dalam beberapa hari terakhir. Hal ini dipicu perseteruan netizen Korea Selatan (Korsel) dengan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

MASALAH bermula, setelah penggemar Korsel diekspose dan dikritik karena melanggar larangan membawa kamera DSLR di konser DAY6 di Malaysia. Lucunya, netizen Indonesia dan Malaysia yang sering adu pendapat, justru kali ini kompak. Solidaritas sesama warga Asia Tenggara bangkit (SEA-bling). Apalagi netizen Korea mulai menghina No Na, *girl group* asal Tanah Air.



Nirmala @n2rmla (Selebtwit)
Yang dilawan SEA, langsung bersatu kita.



Safira @dearsafira (Selebtwit)
SEA-blings bersatu.



Tari @teedewy (Selebtwit)
Asbun orang Indonesia, Malaysia, Thailand lucu banget.



Rizal Do @afkrml (Influencer)
Semua pertikaian orang Korea vs SEA tuh awal mulanya 'cuma' karena dilarangnya *fansite* bawa 'kamera teropong' pas konser di Malaysia dan mereka nggak suka dengan aturan tersebut lalu mulai mengolok-olok kita? Gitu kah?



Salsa @salsaanz (Selebtwit)
Mereka yang salah, mereka pula yang ngejek dan rasis. Alhasil kena bombardir dari netizen se-Asia Tenggara kan.



Ayle @mrndalstr (Selebtwit)
Lucunya malah mereka *playing victim*, dikira kita yang mulai *war* duluan.



Ann @serenityxoed (Selebtwit)
War-nya lucu, apalagi lihat respons mereka. Nggak tau aja mereka, netizen kita gimana.



Dian Pratiwi @dianypratiwi (Selebtwit)
Serunya mereka yang rasis, dibales malah ngamuk-ngamuk, kemana-mana bahasannya.